



PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2022

2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2022

2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



**Pemerintah
Kabupaten Mojokerto**

**Judul: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
LP2KD KABUPATEN MOJOKERTO - TAHUN 2022**

Penanggungjawab:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto

2023



Pemerintah
Kabupaten Mojokerto

Kata Pengantar



engan memanjatkan puji syukur kehadirat *Allah* SWT, atas hidayah-Nya sehingga pada tahun ini dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang terdapat di negara berkembang termasuk Indonesia. Tantangan ini membuat pemerintah berkepentingan untuk lebih serius memformulasikan kebijakan yang utuh dalam penanggulangan kemiskinan. Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto telah dirumuskan fondasi kebijakan yang secara eksplisit bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan sekaligus memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin nasional. Untuk mewujudkan target-target yang tercantum dalam RPJMD, maka diperlukan pendekatan baru yang mampu mengakselerasi proses peningkatan capaian. Strategi mewujudkan percepatan tersebut ditempuh melalui dua cara yaitu peningkatan efektivitas program dan pelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, setiap tahun disusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) untuk disampaikan kepada Bupati Mojokerto dan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dokumen ini memberikan data dan fakta bagaimana pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Dari data yang disampaikan, diharapkan tergambar capaian positif sekaligus kekurangan berbagai program yang telah dilakukan terhadap perkembangan beberapa indikator utama kemiskinan.

Sebagai sebuah kerja sistem, kita tentu memahami bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan kebersamaan, sinergi lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan. Kita senantiasa mendorong peran sinergis swasta dalam berkontribusi program sosialnya agar lebih fokus dan terarah. Pada saat yang sama, kita berharap agar masyarakat semakin mampu menggalang modal sosialnya seperti solidaritas, kepercayaan dan gotong royong untuk mendorong lebih banyak masyarakat menikmati kesejahteraan.

Ucapan terima kasih atas kerjasama semua pihak dalam mewujudkan prestasi bersama yang telah dicapai sejauh ini. Namun kami percaya, bahwa kita tidak cepat berpuas diri. Capaian di Tahun 2022 ini akan menjadi pendorong kita untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya, semoga *Allah* SWT senantiasa memberikan hidayah dan *me-ridloi* segala upaya kita bersama dalam mewujudkan gerakan bersama Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, Aamiin.

Mojokerto, Maret 2023

BAPPEDA
Kabupaten Mojokerto



Ringkasan Eksekutif

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 berada pada angka 9,71 persen, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,91 persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021. Kondisi capaian ini lebih rendah terhadap capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur yang sebesar 10,38 persen, akan tetapi masih lebih tinggi terhadap capaian Nasional yang tercatat sebesar 9,54 persen.

Jika merujuk pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, maka capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2022 telah memenuhi target RPJMD yang menetapkan target pada Tahun 2022 sebesar 9,97 persen. Sedangkan jika menggunakan standar target yang termuat pada dokumen RPJMN 2020-2024, dimana angka kemiskinan nasional ditargetkan sebesar 6 persen (target ideal) sampai dengan 7 persen (target konservatif), maka dengan tolok ukur tersebut Kabupaten Mojokerto masih belum memenuhi target Nasional.

Pada saat yang sama, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan capaian yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 TPT Kabupaten Mojokerto sebesar 5,54 persen sedangkan di tahun 2021 turun menjadi sebesar 4,83 persen. Dalam 5 tahun terakhir tingkat

pengangguran terbuka Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi dengan kecenderungan tren yang sedikit meningkat. Pada Tahun 2018, TPT Kabupaten Mojokerto berada pada angka 4,21 persen, sedangkan kondisi TPT tahun 2022 sebagaimana telah disebutkan tercatat sebesar 4,83 persen. Capaian TPT Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sudah lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur yang sebesar 5,49 persen maupun capaian Nasional yang berada pada angka 5,86 persen.

RPJMD Kabupaten Mojokerto menargetkan pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,42 persen. Sementara itu RPJMN menargetkan tingkat pengangguran pada angka 3,6-4,3 persen pada tahun 2024. Dengan demikian berdasarkan target pada RPJMD, TPT Kabupaten Mojokerto telah memenuhi target. Sedangkan berdasarkan RPJMN, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2022 belum terpenuhi.

Perkembangan TPT selama lima tahun terakhir, baik secara Nasional maupun Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola perkembangan dengan kecenderungan meningkat (khususnya pada tahun 2020), demikian juga dengan kondisi di Kabupaten Mojokerto, sehingga hal ini berarti bahwa kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto pada dasarnya masih relevan dengan kebijakan Nasional maupun Provinsi Jawa Timur, meski intervensi kebijakan di sektor ini ternyata masih belum berjalan efektif untuk menurunkan angka pengangguran terbuka di tahun 2022.

Pada dimensi pendidikan, analisis pada 9 (sembilan) indikator, indikator APM jenjang SD/MI sederajat dan jenjang SMA/SMK/MA sederajat menunjukkan

penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya (capaian tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021). Selain itu kedua indikator tersebut juga menampilkan pola perkembangan antar waktu 5 tahunan (tahun 2018-2022) dengan kecenderungan tren yang menurun.

Untuk dimensi kesehatan, dari 12 (dua belas) indikator, hanya terdapat 1 (satu) indikator yang capaian kinerja tahun 2022 lebih buruk/naik terhadap tahun 2021 dan sekaligus menampilkan data deret waktu tahun 2018-2022 dengan kecenderungan tren meningkat/memburuk, yaitu indikator AKBA (Angka Kematian Balita). Sementara itu, indikator prevalensi Balita gizi buruk, meskipun capaian kinerja tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021, akan tetapi berdasarkan deret waktu tahun 2017-2021 masih menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan tren yang meningkat/memburuk.

Untuk isu infrastruktur dasar rumah tangga, dari 6 (enam) indikator utama yang di analisis, hanya indikator Rumah Tangga dengan akses Air Minum Layak yang mengalami penurunan capaian kinerja terhadap tahun sebelumnya (capaian kinerja tahun 2022 lebih rendah/lebih buruk dari tahun 2021), meski demikian secara umum masih menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan meningkat.

Di bidang ketahanan pangan, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 berhasil menurunkan angka kerawanan pangan (yaitu penduduk dengan asupan kalori ≤ 1.400 k.kal/kapita/hari) lebih dari separuh kondisi pada tahun 2021. Di sisi lain justru produktivitas padi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 mengalami penurunan.

Pengembangan kebijakan pemerintah dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 semakin baik. Penanggulangan kemiskinan akan terus dipertajam arah kebijakannya, sekaligus diupayakan untuk memberikan payung hukum bagi proses integrasi dan harmonisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Daerah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020, fungsi dan peran TKPK di Kabupaten Mojokerto terus ditingkatkan. Terutama dalam hal pelaksanaan agenda kerja tahunan TKPK. Salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah mendorong sinergi yang lebih baik terhadap sektor swasta. Koordinasi yang lebih intensif perlu di dorong untuk memastikan program-program sosial yang dilakukan oleh perusahaan memiliki keselarasan dengan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hal lain yang penting untuk mendapatkan perhatian adalah isu penguatan kapasitas sumberdaya manusia, baik sumberdaya manusia di TKPK, maupun sumberdaya manusia di tingkat OPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan. Pada Tahun 2022, penguatan kapasitas masih dilakukan secara sektoral. Masing-masing Perangkat Daerah melakukan penguatan kapasitas pelaksana program/kegiatan sesuai kebutuhan sektoral. Paradigma baru tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang menekankan keterpaduan, mensyaratkan kesamaan cara pandang terhadap pentingnya koordinasi dari para pelaksana kegiatan secara optimal. Oleh karenanya,

dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kegiatan penguatan kapasitas yang selama ini berjalan.

Penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini merupakan salah satu upaya untuk secara bersama-sama memecahkan masalah kemiskinan. Komitmen yang kuat dan langkah nyata dari seluruh pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan menjadi arus utama dari seluruh kebijakan daerah.





Daftar Isi

| | Halaman: |
|--|----------|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Ringkasan Eksekutif | iv |
| Daftar Isi | ix |
| Daftar Gambar | xi |
| Daftar Tabel | xiii |
| Daftar Singkatan | xv |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat | 4 |
| 1.3. Landasan Hukum | 5 |
| 1.4. Sistematika | 7 |
| Bab II Kondisi Umum Daerah | 8 |
| 2.1. Geografi dan Topografi | 8 |
| 2.2. Administrasi Wilayah | 9 |
| 2.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan | 12 |
| 2.4. Pendidikan | 18 |
| 2.5. Perumahan | 21 |
| 2.6. Perekonomian | 23 |
| 2.7. PDR per Kapita | 26 |

| | | |
|---------|--|----|
| Bab III | Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan | 29 |
| | 3.1. Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | 29 |
| | 3.1.1. Struktur Organisasi TKPK | 29 |
| | 3.1.2. Tugas dan Fungsi TKPK | 34 |
| | 3.2. Pelaksanaan Agenda Kerja TKPK | 36 |
| | 3.3. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan | 36 |
| | 3.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat | 38 |
| | 3.5. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan | 39 |
| Bab IV | Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan | 41 |
| | 4.1. Program Penanggulangan Kemiskinan | 42 |
| | 4.1.1. Program Nasional dan Provinsi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto | 43 |
| | 4.1.2. Program Penanggulangan Kemiskinan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Mojokerto | 45 |
| | 4.2. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan | 62 |
| | 4.2.1. Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan | 62 |
| | 4.2.2. Capaian Kinerja Tahunan Indikator Bidang terkait Isu Kemiskinan | 73 |
| Bab V | Penutup | 82 |
| | 5.1. Kesimpulan | 82 |
| | 5.2. Rekomendasi | 86 |

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran





Daftar Gambar

| | Halaman: |
|---|----------|
| Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Mojokerto | 11 |
| Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022 | 13 |
| Gambar 2.3. Persentase Penduduk Kabupaten Mojokerto berdasar Sebaran Kelompok Usia Produktif, Tahun 2022 | 15 |
| Gambar 2.4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022 | 26 |
| Gambar 3.1. Struktur Organisasi berdasarkan Permendagri 53/2020 | 30 |
| Gambar 4.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto | 62 |
| Gambar 4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto .. | 63 |
| Gambar 4.3. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kab. Mojokerto | 59 |
| Gambar 4.4. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2022 | 65 |
| Gambar 4.5. Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menurut Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 dan Perkembangan Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022 | 66 |
| Gambar 4.6. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mojokerto | 67 |

| | |
|---|----|
| Gambar 4.7. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mojokerto terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2022 | 68 |
| Gambar 4.8. Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menurut Kategori Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2022 dan Perkembangan Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2018-2022 | 69 |
| Gambar 4.9. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Mojokerto | 70 |
| Gambar 4.10. Posisi Relatif Indeks Keparahan Indeks Kabupaten Mojokerto terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2022 | 70 |
| Gambar 4.11. Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menurut Kategori Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2022 dan Perkembangan Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2018-2022 | 71 |





Daftar Tabel

| | Halaman: |
|--|----------|
| Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah | 12 |
| Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021 dan Tahun 2022 | 13 |
| Tabel 2.3. Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Penduduk Miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto | 15 |
| Tabel 2.4. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2022 | 18 |
| Tabel 2.5. Perkembangan Indikator Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2022 | 20 |
| Tabel 2.6. Perkembangan Indikator Perumahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020 | 22 |
| Tabel 2.7. Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022 | 24 |
| Tabel 2.8. Perkembangan PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022 | 27 |
| Tabel 4.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Mojokerto | 44 |
| Tabel 4.2. Perkembangan Capaian Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan PDRB per Kapita di Kabupaten Mojokerto | 64 |
| Tabel 4.3. Perkembangan Capaian P0, P1, dan P2 Kabupaten Mojokerto .. | 72 |

| | |
|--|----|
| Tabel 4.4. Posisi Relatif Capaian Kinerja Indikator terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Mojokerto terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2022 | 74 |
| Tabel 4.5. Perkembangan Antar Waktu Capaian Kinerja Indikator terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Mojokerto | 77 |
| Tabel 5.1. Indikator-Indikator terkait Isu Kemiskinan dengan Capaian Kinerja Positif | 84 |
| Tabel 5.2. Rencana Tindak Lanjut | 87 |





Daftar Singkatan

| | |
|----------|---|
| AKB | : Angka Kematian Bayi |
| AKBa | : Angka Kematian Balita |
| AKI | : Angka Kematian Ibu |
| AKN | : Angka Kematian <i>Neo-Natal</i> |
| AMH | : Angka Melek Huruf |
| APBD | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional |
| APK | : Angka Partisipasi Kasar |
| APM | : Angka Partisipasi Murni |
| APS | : Angka Putus Sekolah |
| ARG | : Anggaran Responsif Gender |
| ART | : Anggota Rumah Tangga |
| ASEAN | : <i>Association South East Asia Nation</i> |
| ASI | : Air Susu Ibu |
| BPS | : Badan Pusat Statistik |
| Bappeda | : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Bappenas | : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BPNT | : Bantuan Pangan Non Tunai |
| CSR | : <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| DAK | : Dana Alokasi Khusus |
| FGD | : <i>Focus Group Discussion</i> |
| Inpres | : Instruksi Presiden |
| KPM | : Kelompok Penerima Manfaat |

| | |
|-------|---|
| MI | : Madrasah Ibtidaiyah |
| MTs | : Madrasah Tsanawiyah |
| OPB | : Organisasi Perangkat Daerah |
| PDRB | : Produk Domestik Regional Bruto |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| RPJMD | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RPJMN | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SDGs | : <i>Sustainable Development Goals</i> |
| SMP | : Sekolah Menengah Pertama |
| Ruta | : Rumah Tangga |
| TPAK | : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |
| TPB | : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| TKK | : Tingkat Kesempatan Kerja |
| TKPK | : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan |
| TNP2K | : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |
| TPT | : Tingkat Pengangguran Terbuka |



**LP2KD
2022**



TKPK
Kabupaten Mojokerto



Bab 1

Pendahuluan

2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



1

BAB

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan permasalahan fundamental yang sejak berabad-abad lalu hingga saat ini masih dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan harus segera ditangani melalui implementasi langkah-langkah penanggulangan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Penanggulangan kemiskinan sebagai agenda global sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), maka kebijakan pembangunan di Indonesia baik pusat maupun daerah diprioritaskan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. Bentuk komitmen Pemerintah terhadap pengentasan penduduk miskin berupa program penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Hal ini secara implisit berarti penanggulangan kemiskinan harus diupayakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan hendaknya dapat dinikmati secara lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang di rilis melalui Berita Resmi Statistik No. 5/07/Th. XXV, 15 Juli 2022, persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Kondisi ini diantaranya karena telah mulai membaiknya kondisi perekonomian setelah pandemi Covid-19 selama tahun 2020 dan tahun 2021.

Meski tidak seluruh Provinsi di Indonesia pada Maret 2022 mengalami penurunan persentase penduduk miskin terhadap September 2021, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari 10,59 (September 2021) menjadi 10,38 (Maret 2022).

Sementara itu persentase penduduk miskin di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Maret 2022 mengalami penurunan terhadap Maret 2021, termasuk Kabupaten Mojokerto yang pada Maret 2022

persentase penduduk miskinnya tercatat sebesar 9,71, turun 0,91 persen poin terhadap Maret 2021.

Di sisi lain, pada tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sejak diberlakukannya, seluruh pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia akan merujuk pada Permendagri tersebut.

Dalam pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 disebutkan bahwa tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan yang salah satunya adalah menyusun dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) yang berdasarkan pasal 25 laporan disampaikan kepada Gubernur paling lama 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan kondisi sebagaimana di uraikan di atas, sekaligus memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Laporan ini juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat.

Penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen LP2KD di Kabupaten Mojokerto yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2022;
2. mendeskripsikan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2022.

Sementara itu manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. tersedianya dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kabupaten Mojokerto tahun 2022;
2. tersedianya informasi tentang capaian kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mojokerto dan rencana tindak lanjut.

1.3. Landasan Hukum.

Penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah ini, merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan dasar hukum kegiatan ini adalah:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4700);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia

tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5235);

- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140);
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 199);
- (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor);
- (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- (10) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- (13) Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/381/HK/416-012/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

1.4. **Sistematika.**

Penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Kondisi Umum Daerah.

BAB III Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV Capaian dan Analisa Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V Penutup.



**LP2KD
2022**



TKPK
Kabupaten Mojokerto



Bab 2

Kondisi Umum Daerah

2023

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



2 **BAB**

Kondisi Umum Daerah

2.1. Geografi dan Topografi.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terletak pada $111^{\circ}20'13''$ sampai dengan $111^{\circ}40'47''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}18'35''$ sampai dengan $07^{\circ}47'30''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 692,15 Km².

Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya dengan batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik;
- sebelah barat : Kabupaten Jombang;
- sebelah selatan : Kabupaten Malang, dan
- sebelah timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

Di samping itu wilayah Kabupaten Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto.

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan bagian pegunungan yang subur. Bagian tengah merupakan bagian

dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur. Sekitar 30 persen dari wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan kemiringan kurang dari 15 derajat.

Pada umumnya ketinggian di wilayah Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (kecuali kecamatan Trawas yang dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut).

Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai sebanyak 61 buah yang sudah mempunyai nama, dan sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto adalah Sungai Brantas dengan debit air ± 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit ± 262 liter/detik.

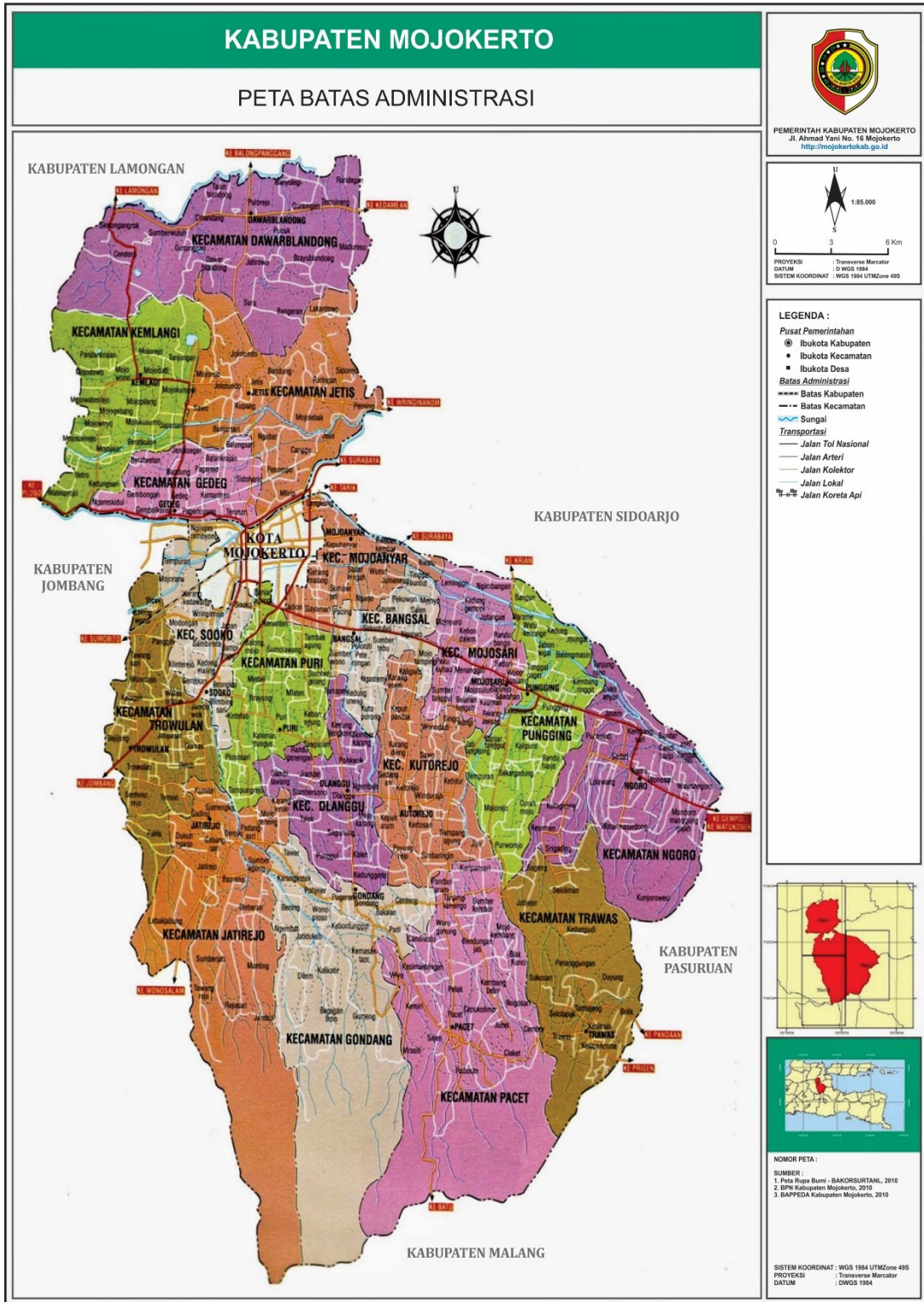
Sesuai dengan letak geografis, iklim di Kabupaten Mojokerto merupakan iklim daerah tropis, dalam setahun ada 2 musim yaitu musim kemarau antara bulan Maret sampai bulan Agustus dan musim penghujan antara bulan September sampai bulan Februari. Curah hujan paling tinggi di bulan Januari dan hari hujan paling banyak pada bulan Desember.

2.2. Administrasi Wilayah.

Secara administratif Kabupaten Mojokerto terbagi ke dalam 18 kecamatan yang terbagi menjadi 299 desa dan 5 Kelurahan, dimana wilayah Kecamatan Dawarblandong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dengan luas wilayah $58,93 \text{ km}^2$ atau sekitar 8,69 persen dari

seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya Kecamatan Ngoro adalah kecamatan dengan wilayah terluas kedua dengan luas wilayah 57,48 km² atau sekitar 8,30 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto, dan kecamatan Jetis merupakan kecamatan terluas ketiga dengan luas wilayah 57,17 km² atau sekitar 8,26 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Gedeg dengan luas wilayah 22,98 km² atau sekitar 3,32 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mojokerto



Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah

| Kecamatan | Jumlah | | | | Luas Wilayah (km ²) |
|-------------------|--------|-----------|-------|-------|------------------------------------|
| | Desa | Kelurahan | RW | RT | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 010 Jatirejo | 19 | - | 103 | 351 | 32,98 |
| 020 Gondang | 18 | - | 82 | 282 | 39,11 |
| 030 Pacet | 20 | - | 133 | 435 | 45,16 |
| 040 Trawas | 13 | - | 74 | 246 | 29,86 |
| 050 Ngoro | 19 | - | 104 | 551 | 57,48 |
| 060 Pungging | 19 | - | 171 | 582 | 48,14 |
| 070 Kutorejo | 17 | - | 132 | 369 | 42,83 |
| 080 Mojosari | 14 | 5 | 134 | 495 | 26,65 |
| 090 Bangsal | 17 | - | 60 | 230 | 24,06 |
| 091 Mojoanyar | 12 | - | 64 | 256 | 23,02 |
| 100 Dlanggu | 16 | - | 88 | 301 | 35,42 |
| 110 Puri | 16 | - | 137 | 431 | 35,65 |
| 120 Trowulan | 16 | - | 110 | 408 | 39,20 |
| 130 Sooko | 15 | - | 113 | 404 | 23,46 |
| 140 Gedeg | 14 | - | 101 | 381 | 22,98 |
| 150 Kemlagi | 20 | - | 134 | 369 | 50,05 |
| 160 Jetis | 16 | - | 124 | 474 | 57,17 |
| 170 Dawarblandong | 18 | - | 159 | 353 | 58,93 |
| Jumlah | 299 | 5 | 2.023 | 6.918 | 692,15 |

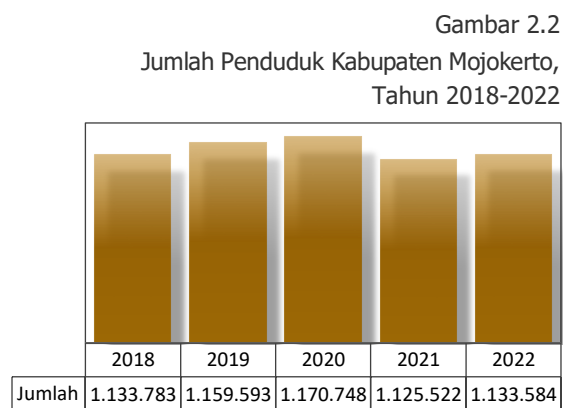
Sumber: BPS. Kabupaten Mojokerto Dalam Angka – data di olah

2.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Kependudukan di Kabupaten Mojokerto, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 berjumlah 1.133.584 jiwa. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,72 persen jika

dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 yang tercatat berjumlah 1.125.522 jiwa.

Angka kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 sebesar ± 1.637 jiwa/km², angka ini naik jika dibandingkan angka kepadatan penduduk 2021 yang sebesar ± 1.626 jiwa/km².



Sumber: BPS Kab. Mojokerto - data di olah

Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 terdapat di Kecamatan Sooko dengan kepadatan penduduk sebanyak ± 3.209 jiwa/km² dan pada tahun 2022 angka kepadatannya turun menjadi ± 3.230 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Dawar Blandong merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu pada tahun 2021 sebesar ± 860 jiwa/km², sedangkan pada tahun 2022 angka kepadatannya turun menjadi ± 864 jiwa/km².

Tabel 2.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan
di Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021 dan Tahun 2022

| Kecamatan | Luas (km ²) | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | Jumlah Penduduk | Kepadatan (jiwa/km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan (jiwa/km ²) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 01 Jatirejo | 32,98 | 44.325 | 1.344,00 | 44.707 | 1.355,58 |
| 02 Gondang | 39,11 | 43.119 | 1.102,51 | 43.470 | 1.111,48 |
| 03 Pacet | 45,16 | 58.913 | 1.304,54 | 59.399 | 1.315,30 |

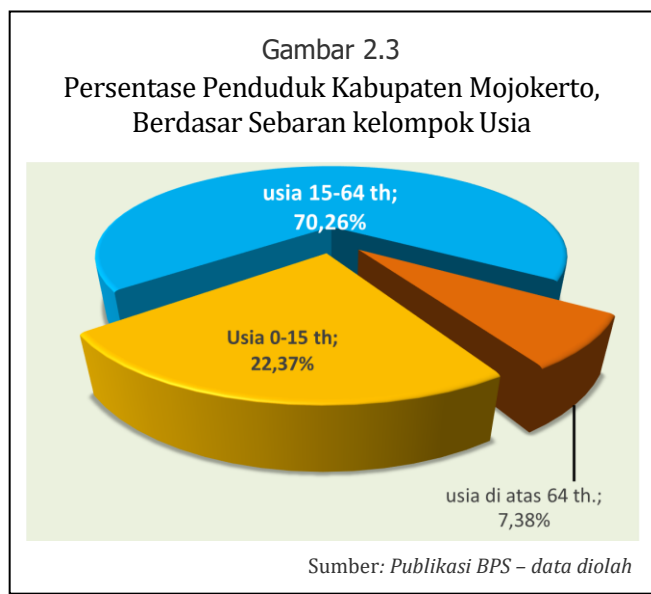
Lanjutan Tabel 2.2

| Kecamatan | Luas (km ²) | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | Jumlah Penduduk | Kepadatan (jiwa/km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan (jiwa/km ²) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 04 Trawas | 29,86 | 31.011 | 1.038,55 | 31.227 | 1.045,78 |
| 05 Ngoro | 57,48 | 85.431 | 1.486,27 | 85.883 | 1.494,14 |
| 06 Pungging | 48,14 | 79.258 | 1.646,41 | 79.850 | 1.658,70 |
| 07 Kutorejo | 42,83 | 66.977 | 1.563,79 | 67.807 | 1.583,17 |
| 08 Mojosari | 26,65 | 78.176 | 2.933,43 | 78.475 | 2.944,65 |
| 09 Bangsal | 24,06 | 51.103 | 2.123,98 | 51.462 | 2.138,90 |
| 10 Mojoanyar | 23,02 | 50.808 | 2.207,12 | 51.154 | 2.222,15 |
| 11 Dlanggu | 35,42 | 55.733 | 1.573,49 | 56.201 | 1.586,70 |
| 12 Puri | 35,65 | 78.532 | 2.202,86 | 79.200 | 2.221,60 |
| 13 Trowulan | 39,20 | 74.829 | 1.908,90 | 75.366 | 1.922,60 |
| 14 Sooko | 23,46 | 75.278 | 3.208,78 | 75.798 | 3.230,95 |
| 15 Gedeg | 22,98 | 56.708 | 2.467,71 | 57.013 | 2.480,98 |
| 16 Kemlagi | 50,05 | 58.016 | 1.159,16 | 58.535 | 1.169,53 |
| 17 Jetis | 57,17 | 86.621 | 1.515,15 | 87.137 | 1.524,17 |
| 18 Dawarblandong | 58,93 | 50.684 | 860,07 | 50.900 | 863,74 |
| Jumlah | 692,15 | 1.125.522 | 1.626,12 | 1.133.584 | 1.637,77 |

Sumber: BPS, Kabupaten Mojokerto Dalam Angka - data di olah

Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 yang berjumlah 1.133.584 jiwa terdiri atas 569.966 jiwa penduduk laki-laki dan 563.518 perempuan, sehingga memiliki angka rasio seks sebesar 99.

Berdasarkan komposisi usia, pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Mojokerto lebih banyak berusia produktif, yaitu penduduk berusia 15–64 tahun dengan jumlah 796.415 jiwa atau 70,26 persen. Sedangkan pada



kelompok usia non produktif (usia kurang dari 15 th dan di atas 64 th) sebanyak 337.169 jiwa atau 29,73 persen. Dengan demikian rasio ketergantungan penduduknya adalah sebesar 42,28 persen.

Jumlah penduduk miskin (individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% Terendah) menurut kecamatan berdasarkan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang di rilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk menurut kecamatan pada tahun yang sama sebagaimana tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Penduduk Miskin
menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Tahun 2022 | Jumlah Individu Desil 1 s/d Desil 4 | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-------|
| | | L | P | Total | % |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 010 Jatirejo | 44.707 | 14.497 | 15.167 | 29.664 | 66,35 |
| 020 Gondang | 43.470 | 12.790 | 12.900 | 25.690 | 59,10 |
| 030 Pacet | 59.399 | 14.079 | 13.949 | 28.028 | 47,19 |
| 040 Trawas | 31.227 | 5.703 | 5.755 | 11.458 | 36,69 |

Lanjutan Tabel 2.3

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Tahun 2022 | Jumlah Individu Desil 1 s/d Desil 4 | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | L | P | Total | % |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 050 Ngoro | 85.431 | 20.761 | 20.540 | 41.301 | 48,09 |
| 060 Pungging | 79.258 | 18.940 | 18.823 | 37.763 | 47,29 |
| 070 Kutorejo | 66.977 | 19.470 | 19.908 | 39.378 | 58,07 |
| 080 Mojosari | 78.176 | 13.423 | 13.147 | 26.570 | 33,86 |
| 090 Bangsal | 51.103 | 11.502 | 11.278 | 22.780 | 44,27 |
| 091 Mojoanyar | 50.808 | 7.784 | 7.537 | 15.321 | 29,95 |
| 100 Dlanggu | 55.733 | 16.970 | 17.454 | 34.424 | 61,25 |
| 110 Puri | 78.532 | 16.220 | 16.353 | 32.573 | 41,13 |
| 120 Trowulan | 74.829 | 21.846 | 22.549 | 44.395 | 58,91 |
| 130 Sooko | 75.278 | 14.380 | 14.452 | 28.832 | 38,04 |
| 140 Gedeg | 56.708 | 10.832 | 10.889 | 21.721 | 38,10 |
| 150 Kemlagi | 58.016 | 15.662 | 15.570 | 31.232 | 53,36 |
| 160 Jetis | 86.621 | 14.702 | 14.627 | 29.329 | 33,66 |
| 170 Dawarblandong | 50.684 | 10.474 | 9.996 | 20.470 | 40,22 |
| Jumlah | 1.133.584 | 520.929 | 260.035 | 260.894 | 45,96 |

Sumber: Publikasi BPS dan PPKE Kab. Mojokerto, data di olah

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Mojokerto pada Agustus 2022 sebesar 906.653 orang, bertambah sekitar 8.674 orang (0,0097 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu. Jumlah tersebut terdiri dari 646.778 orang penduduk angkatan kerja dan 259.875 orang penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) Kabupaten Mojokerto mencapai 71,34 persen. Dari penduduk angkatan kerja tersebut, terdapat penduduk yang bekerja sebesar 615.557 orang, bertambah sekitar 17.782 orang (0,0297%) dibandingkan keadaan Agustus 2021.

Sektor jasa dan perdagangan masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan menyerap sebesar 267.863 orang (43,52%) dari total penduduk bekerja, sedangkan sektor pertanian paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya 199.291 orang (16,75%) dari total penduduk bekerja. Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar pekerja di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 39,70 persen dari total pekerja. Pendidikan sebagian besar pekerja masih rendah (SLTP ke bawah), yaitu 354.111 orang (57,52%), sedangkan pekerja dengan pendidikan tinggi Diploma ke atas hanya sekitar 43.062 orang (7%).

Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2022 mencapai sekitar 31.221 orang, berkurang sebanyak 5.296 orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,83 persen, mengalami penurunan sebesar 0,71 persen dibandingkan TPT Agustus 2021 (5,54%). Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk yang menganggur dengan pendidikan SMK sebesar 32,18 persen, sedangkan penduduk yang menganggur terendah berdasarkan tingkat pendidikan adalah penduduk dengan pendidikan diploma dan sarjana (4,34%).

Tabel 2.4
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto,
Tahun 2020-2022

| Indikator | Keadaan Agustus Tahun: | | |
|---|------------------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jumlah penduduk usia kerja | 888.970 | 897.979 | 906.603 |
| Laki-Laki | 442.028 | 446.472 | |
| Perempuan | 446.942 | 451.507 | |
| Jumlah penduduk angkatan kerja | 620.390 | 632.808 | 646.778 |
| Laki-Laki | 380.635 | 381.748 | 390.533 |
| Perempuan | 239.755 | 251.060 | 256.245 |
| penduduk bekerja | 584.689 | 597.775 | 615.557 |
| Laki-Laki | 362.334 | 363.193 | 373.997 |
| Perempuan | 222.355 | 234.582 | 241.560 |
| pengangguran terbuka | 35.701 | 35.033 | 31.221 |
| Laki-Laki | 18.301 | 18.555 | 16.563 |
| Perempuan | 17.400 | 16.478 | 14.685 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 69,79 | 70,47 | 71,34 |
| Laki-Laki | 86,11 | 85,50 | 86,64 |
| Perempuan | 53,64 | 55,60 | 56,21 |
| Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) | 94,25 | 94,46 | 95,17 |
| Laki-Laki | 95,19 | 95,14 | 95,77 |
| Perempuan | 92,74 | 93,44 | 94,27 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 5,75 | 5,54 | 4,83 |
| Laki-Laki | 4,81 | 4,86 | 4,23 |
| Perempuan | 7,26 | 6,56 | 5,73 |

Sumber: BRS Kab. Mojokerto No.01/01/3516/ Th. III, 6 Januari 2023 - data di olah

2.4. Pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan baik secara formal maupun non formal mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Ukuran dasar tingkat pendidikan adalah kemampuan penduduk 10 tahun ke atas untuk baca tulis huruf latin dan

atau huruf lainnya (melek huruf). Kemampuan baca tulis merupakan kemampuan intelektual minimum karena sebagian besar informasi dan ilmu pengetahuan diperoleh melalui membaca.

Angka buta huruf merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antar wilayah, mengingat buta huruf selalu identik dengan keterbelakangan serta ketidakberdayaan yang umumnya menjadi ciri masyarakat marginal. Pada tahun 2022 masih ada sekitar 4,75 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Mojokerto yang buta huruf atau penduduk yang melek huruf sebesar 95,25 persen. Sementara persentase penduduk laki-laki yang buta huruf sebesar 3,32 persen dan perempuan 6,16 persen, dari data ini tampak bahwa persentase buta huruf laki-laki lebih rendah dibanding angka buta huruf perempuan.

Di lihat dari partisipasi sekolah, pada tahun 2022 penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Mojokerto sebesar 17,49 persen sedang bersekolah, 80,28 persen tidak bersekolah lagi dan ada sebesar 2,23 persen tidak/ belum pernah sekolah. Sementara persentase penduduk laki-laki yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 1,28 persen dan perempuan 3,18 persen, di sini terlihat bahwa persentase laki-laki yang tidak/belum pernah sekolah lebih rendah dibanding perempuan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki) merupakan indikator kualitas sumber daya manusia, karena semakin tinggi ijazah yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah mencerminkan

kualitas penduduk di daerah tersebut. Pada tahun 2021, penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Mojokerto sebagian besar jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu SMA/SMK/MA sederajat yaitu sebesar 34,96 persen, pada urutan kedua penduduk yang mempunyai ijazah hingga tingkat SMP/MTs sederajat sebesar 25,93 persen dan peringkat ketiga adalah yang tidak memiliki ijazah minimal SD/sederajat sebesar 23,40 persen. Sementara itu terdapat 84,63 persen penduduk laki-laki yang mempunyai ijazah SD hingga SMA/SMK/MA sederajat, sedangkan untuk penduduk perempuan dengan ijazah SD hingga SMA/SMK/MA sederajat sebesar 78,47 persen. Di sini terlihat bahwa persentase penduduk perempuan dengan ijazah SD/MI hingga SMA/SMK/MA sederajat lebih rendah terhadap penduduk laki-laki.

Tabel 2.5
Perkembangan Indikator Pendidikan Kabupaten Mojokerto,
Tahun 2020-2022

| Indikator | Keadaan Tahun (dalam %) | | |
|--|-------------------------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Partisipasi bersekolah penduduk usia 7-12 tahun | 99,70 | 99,57 | 98,57 |
| Laki-Laki | 100,00 | 99,15 | 98,26 |
| Perempuan | 99,73 | 100,00 | 98,89 |
| Partisipasi bersekolah penduduk usia 13-15 tahun | 98,97 | 98,61 | 99,78 |
| Laki-Laki | 98,00 | 100,00 | 99,62 |
| Perempuan | 100,00 | 96,81 | 100,00 |
| Partisipasi bersekolah penduduk usia 16-18 tahun | 81,32 | 82,34 | 86,76 |
| Laki-Laki | 74,70 | 80,43 | 84,45 |
| Perempuan | 87,56 | 84,50 | 88,69 |

Lanjutan tabel 2.5

| Indikator | Keadaan Tahun (dalam %) | | |
|---|-------------------------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Ijazah tertinggi penduduk usia 15 tahun ke atas | | | |
| Tidak memiliki ijazah SD | 14,58 | 12,14 | 7,56 |
| Laki-Laki | 10,96 | 8,61 | 5,74 |
| Perempuan | 18,16 | 15,65 | 9,41 |
| SD/MI sederajat | 23,40 | 22,29 | 23,10 |
| Laki-Laki | 22,09 | 22,36 | 20,89 |
| Perempuan | 24,70 | 22,23 | 25,35 |
| SMP/MTs sederajat | 24,24 | 24,20 | 25,93 |
| Laki-Laki | 24,88 | 23,57 | 26,03 |
| Perempuan | 23,61 | 24,83 | 25,82 |
| SMA/MA/SMK sederajat | 33,58 | 33,19 | 34,96 |
| Laki-Laki | 37,06 | 37,36 | 38,63 |
| Perempuan | 30,16 | 29,05 | 31,23 |
| Diploma (D1/D2/D3) | 1,09 | 0,98 | 0,11 |
| Laki-Laki | 0,12 | 0,45 | 0,00 |
| Perempuan | 1,45 | 1,41 | 0,23 |
| Sarjana-Pasca Sarjana (D4/S1-S3) | 5,55 | 7,19 | 8,33 |
| Laki-Laki | 5,70 | 7,66 | 8,70 |
| Perempuan | 5,41 | 6,73 | 7,96 |
| Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas | 95,38 | 95,25 | 96,41 |
| Laki-Laki | 96,55 | 95,68 | 97,68 |
| Perempuan | 94,23 | 93,84 | 95,14 |

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 - di olah

2.5. Perumahan.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022, status rumah tempat tinggal yang ditempati oleh rumah tangga di Kabupaten Mojokerto sebesar

94,87 persen menempati rumah milik sendiri dengan luas lantai yang terbanyak di atas 20 meter persegi (89,30%). Berdasarkan kualitas rumah, ada sekitar 93,64 persen rumah tangga di Kabupaten Mojokerto dengan rumah berlantai bukan tanah dengan dan dinding terluas dari tembok sekitar 94,71 persen dan rumah menggunakan atap terluas dari genteng (genteng beton/keramik/tanah liat/metal) sebesar 96,58 persen.

Sementara itu sebanyak 88,63 persen rumah tangga di Kabupaten Mojokerto sudah menempati rumah dengan fasilitas tempat buang air besar digunakan hanya oleh ART (Anggota Rumah Tangga) itu sendiri. Bila dilihat tempat pembuangan akhir tinjanya sekitar 91,34 persen menggunakan tangki septik/*septic tank* sebagai sarana pembuangan akhir tinja, ini sesuai syarat kesehatan.

Tabel 2.6
Perkembangan Indikator Perumahan Kabupaten Mojokerto,
Tahun 2020-2022

| Indikator | Keadaan Tahun (dalam %) | | |
|---|-------------------------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Rumah/bangunan tempat tinggal milik sendiri | 92,14 | 92,23 | 94,87 |
| Rumah dengan luas lantai >20m ² | 84,31 | 89,30 | 99,27 |
| Rumah dengan lantai terluas bukan tanah | 95,62 | 93,64 | 96,17 |
| Rumah dengan atap terluas dari genteng/beton | 95,49 | 96,58 | 94,81 |
| Rumah dengan dinding terluas tembok | 96,85 | 94,71 | 95,49 |
| Rumah dengan fasilitas BAB digunakan sendiri | 85,73 | 88,63 | 91,07 |
| Rumah dengan fasilitas tangki/ <i>septic tank</i> | 96,67 | 91,34 | 95,25 |

Keterangan : Satuan indikator adalah rumah tangga

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur - data di olah

2.6. **Perekonomian.**

Untuk dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat struktur ekonomi dan perkembangannya.

1) **Struktur Ekonomi.**

Struktur ekonomi Kabupaten Mojokerto dapat diketahui dengan melihat per-kembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Selama lima tahun terakhir (Tahun 2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto di dominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya lapangan usaha Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mojokerto. Kelima kategori tersebut, memberikan kontribusi sebesar 87,77 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 56,55 persen (angka ini meningkat dari 55,77 persen di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,34 persen (naik dari 10,28 persen di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,98 persen (turun dari 8,33 persen di tahun 2021) dan lapangan usaha

Informasi dan Komunikasi sebesar 5,51 persen (turun dari 5,72 persen di tahun 2021).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut di atas, Industri Pengolahan mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya lapangan usaha Konstruksi perannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan ketiga lapangan usaha lainnya, perannya berfluktuasi tetapi cenderung menurun. Sementara peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Tabel 2.7
Distribusi Persentase PDRB-ADHB Kabupaten Mojokerto
Tahun 2018-2022

| Kategori Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A Pertanian, Kehutanan Perikanan | 8,13 | 7,79 | 7,96 | 7,66 | 7,54 |
| B Pertambangan dan Penggalian | 0,97 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,91 |
| C Industri Pengolahan | 53,48 | 53,83 | 54,56 | 55,77 | 56,55 |
| D Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| E Pengadaan Air, Pengelo- laan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| F Konstruksi | 9,93 | 9,70 | 8,99 | 8,33 | 7,98 |
| G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,40 | 10,51 | 10,07 | 10,28 | 10,34 |
| H Transportasi dan Pergudangan | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,30 | 1,41 |

Lanjutan Tabel 2.7

| Kategori Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,20 | 2,23 | 1,94 | 1,94 | 2,01 |
| J Informasi dan Komunikasi | 5,31 | 5,34 | 5,81 | 5,72 | 5,51 |
| K Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,58 | 1,55 | 1,57 | 1,53 | 1,47 |
| L Real Estate | 1,50 | 1,50 | 1,56 | 1,49 | 1,43 |
| M,N Jasa Perusahaan | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,36 | 2,42 | 2,48 | 2,32 | 2,15 |
| P Jasa Pendidikan | 1,32 | 1,31 | 1,35 | 1,26 | 1,17 |
| Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,38 | 0,39 | 0,44 | 0,43 | 0,42 |
| R,S,T,U Jasa Lainnya | 0,86 | 0,87 | 0,76 | 0,75 | 0,83 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

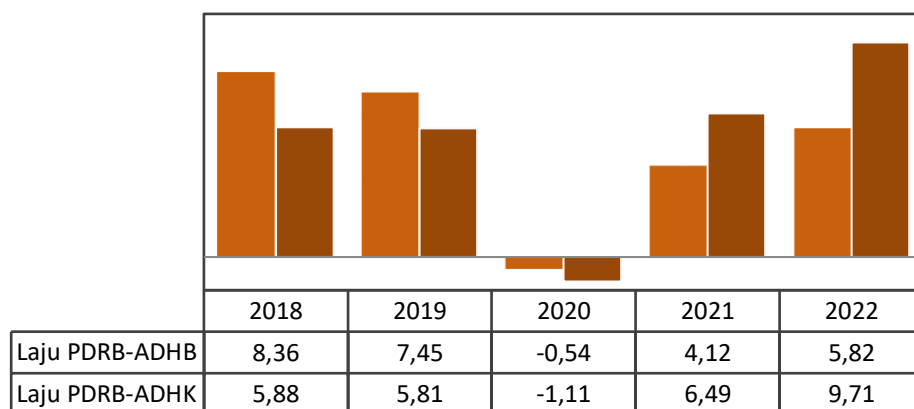
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Lapangan usaha Industri Pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian, peranannya semakin berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2022, setelah berakhirnya pandemi Covid-19, kontribusi lapangan usaha ini semakin meningkat. Hal ini menunjukkan Lapangan usaha Industri Pengolahan masih menjadi penyangga dalam perekonomian Kabupaten Mojokerto.

2) Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 semakin naik. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Mojokerto tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 63.699,84 milyar rupiah. Angka tersebut naik dari 60.198,7 milyar rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 4,12 persen.

Gambar 2.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017-2021 – data di olah

2.7. PDRB per Kapita.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro lain terkait tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu merupakan hasil bagi antara nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah/wilayah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat pada daerah/wilayah tersebut.

Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Mojokerto atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 77,53 juta rupiah, secara nominal mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 84.46 juta rupiah (lihat tabel 2.8). Angka PDRB per Kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.8
Perkembangan PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Mojokerto,
Tahun 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Nilai PDRB (dalam milyar rupiah): | | | | | |
| - ADHB | 76.678,34 | 82.387,91 | 81.940,86 | 87.261,74 | 95.738,11 |
| - ADHK 2010 | 55.256,61 | 58.467,15 | 57.818,42 | 60.198,69 | 63.699,84 |
| PDRB per Kapita (dalam ribu rupiah): | | | | | |
| - ADHB | 69.159,46 | 73.651,05 | 73.335,46 | 77.530,01 | 84.456,12 |
| - ADHK 2010 | 49.838,29 | 52.266,98 | 51.746,35 | 53.485,14 | 56.193,31 |
| Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%) | 5,00 | 4,87 | -1,00 | 3,36 | 5,06 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Peningkatan atau penurunan angka PDRB per kapita dari tahun ke tahun, secara umum akan membawa pengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.



**LP2KD
2022**



TKPK
Kabupaten Mojokerto



Bab 3

Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



3 BAB

Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

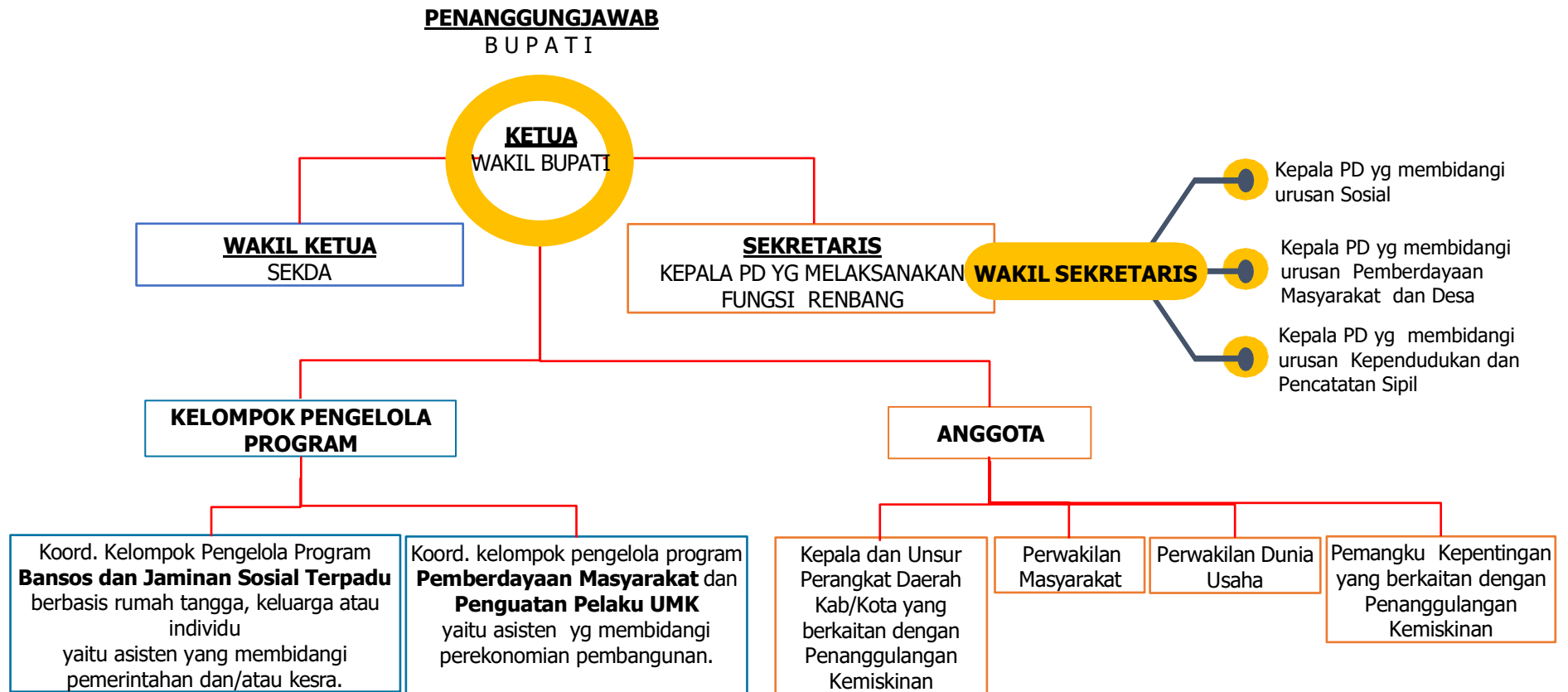
3.1. Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojokerto dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan pelaksanaan rapat koordinasi, monitoring evaluasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.1.1. Struktur Organisasi TKPK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang penanggulangan Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, struktur organisasi TKPK dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi TKPK berdasarkan Permendagri 53/2020



Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto nomor 188.45/381/HK/416-012/2017, susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- Penanggungjawab : Bupati Kabupaten Mojokerto.
- Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah.
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Sekretariat :
- a. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 2) Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumberdaya Alam dan Teknologi tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - 3) Kepala Sub Dinas Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 4) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi:

- a. Ketua : Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah.
- c. Anggota : 1) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2) Unsur Perbankan.

3) Unsur Dunia Usaha.

Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat:

- a. Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat.
- c. Anggota : 1) Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3) Unsur Tokoh Masyarakat.

Kelompok Program Bantuan Sosial:

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial.
- c. Anggota : 1) Kepala Dinas Kesehatan.
2) Kepala Dinas Pendidikan.
3) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
4) Unsur Dinas Pendidikan.
5) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6) Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Anggota : 1) Kepala Dinas Pertanian.
2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

- 3) Kepala Dinas Pangan dan Perikanan.
- 4) Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 5) Kepala Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 6) Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 7) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil:

- a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - 2) Kepala Perempuan Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - 3) Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
 - 4) Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - 5) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kelompok Program Lainnya:

- a. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- c. Anggota :
 - 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - 2) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - 3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- 4) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- 5) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- 6) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 7) Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 8) 2 (dua) unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 9) Unsur Dinas Pendidikan Kesehatan.

Struktur maupun susunan kelembagaan TKPK Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2020 masih merujuk pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2010, karena pembentukan Kelembagaan ini telah sejak tahun 2017, sementara Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 baru berlaku pada Juli 2020. Sehingga Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan menyesuaikan struktur kelembagaan TKPK sebagaimana Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 pada tahun 202.

3.1.2. Tugas dan Fungsi TKPK.

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan

koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

Dalam melaksanakan tugas, TKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Tata kerja TKPK dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan yang memuat rencana kerja penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT), dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Penyusunan RPKD, RAT, dan LP2KD dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua TKPK.

3.2. Pelaksanaan Agenda Kerja TKPK.

Sebagian besar tugas dan fungsi TKPK terkait dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten Mojokerto umumnya berupa rapat koordinasi, yaitu:

- Rapat koordinasi tingkat daerah (Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur); dan
- Rapat koordinasi dengan kelembagaan di tingkat pusat.

Di samping rapat-rapat koordinasi, TKPK Kabupaten Mojokerto juga melakukan kegiatan fasilitasi beberapa kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Mojokerto melibatkan seluruh unsur yang terlibat dalam struktur TKPK Kabupaten Mojokerto. Selaku penanggungjawab, Wakil Bupati Mojokerto berperan penting dalam menggerakkan seluruh elemen untuk menyukseskan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

3.3. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan dengan mengamati pencapaian indikator program dan kegiatan dalam tahapan sebagai berikut:

1. masukan (*input*);
2. kegiatan (*process*);
3. keluaran (*output*);
4. sasaran (*outcome*);
5. tujuan (*goals*).

Monitoring evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap:

1. monitoring terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
2. monitoring terhadap program penanggulangan kemiskinan ber-sasaran;
3. evaluasi terhadap *output* program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
4. evaluasi terhadap capaian indikator (*outcome*) kemiskinan.

Metode yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi antara lain:

1. metode survei: mengumpulkan informasi yang relevan dari responden yang diperoleh dari sampel yang representatif.
2. metode partisipatif: mendapatkan informasi melalui pelibatan secara intensif dan observasi langsung dalam kurun waktu tertentu.
3. analisis anggaran: menganalisis item-item pengeluaran program dan membandingkan dengan rencana awal.

4. kunjungan lapangan (*spot check/rapid appraisal*): memperoleh informasi secara cepat dari penerima program maupun pemangku kepentingan lainnya.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dikoordinasi oleh Koordinator Kelompok Program terkait program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Koordinator Kelompok Program tersebut akan membentuk tim beranggotakan Anggota Kelompok Program, Anggota TKPK, dan Perangkat Daerah terkait yang menjadi Satuan Kerja (Satker) pelaksana dari setiap Program dan kegiatan dimaksud.

Mengingat hampir sepanjang tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan.

3.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Secara luas, pengertian pengaduan masyarakat pada program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto adalah langkah tindakan masyarakat yang ditujukan pada Pemerintah, menyangkut:

- upaya masyarakat memperoleh informasi/kejelasan tentang program/kegiatan/pelayanan terkait dengan masyarakat miskin;
- upaya masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan yang diterima oleh masyarakat miskin; dan

- upaya masyarakat untuk menyampaikan komplain terkait dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat miskin akibat pelaksanaan pembangunan.

3.5. Hambatan dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan.

Beberapa hambatan dan tantangan yang ditemui dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) dalam hal Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan:

Hal terpenting dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan adalah menyangkut fokus, lokus, dan komplementaris program. Karena keterbatasan sumberdaya, belum semua OPD pengampu program penanggulangan kemiskinan memperhatikan hal-hal tersebut dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

- 2) dalam hal Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan:

Sebagaimana diungkapkan oleh BPS bahwa perlu adanya "satu data" untuk sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan yang dalam hal ini adalah bersumber dari DTKS, sementara belum semua OPD menggunakan sumber data DTKS dalam menentukan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan, beberapa OPD mempunyai data sendiri atau menggunakan

sumber data lain untuk menentukan sasaran penerima manfaat.

3) dalam hal Lembaga Pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan:

Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) masih belum optimal khususnya dalam hal sinkronisasi dan harmonisasi program dan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

4) dalam hal Anggaran Penanggulangan Kemiskinan:

Kinerja anggaran tahun 2022 tidak memiliki masalah yang substansial.



**LP2KD
2022**



TKPK
Kabupaten Mojokerto



Bab 4

Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



4

BAB

Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

4.1. Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dan berdasarkan pasal 18 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 (tiga) kelompok program, yaitu:

- a) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c) program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Adapun sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan berdasarkan pasal 19 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 adalah berdasarkan pada data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. Data dimaksud oleh TKPK Kabupaten Mojokerto disepakati bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

4.1.1. Program Nasional dan Provinsi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Berikut ini program-program Nasional dan Provinsi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022.

- 1) Nama program nasional : Program Biaya Operasional Sekolah (BOS)
Sasaran : SD dan SMP (Negeri dan Swasta)
Lembaga pelaksana : Kemendikbud
- 2) Nama program nasional : Program Indonesia Pintar (PIP)
Sasaran : Siswa SD dan SMP pemegang KIP
Lembaga pelaksana : Kemendikbud
- 3) Nama program nasional : Program Keluarga Harapan (PKH)
Sasaran : KPM Pra-Sejahtera
Lembaga pelaksana : Kementerian Sosial
- 4) Nama program nasional : Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Sasaran : KPM Pra-Sejahtera
Lembaga pelaksana : Kementerian Sosial
- 5) Nama program nasional : Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
Sasaran : Kelurahan
Lembaga pelaksana : Kementerian Pekerjaan Umum

4.1.2. Program Penanggulangan Kemiskinan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Mojokerto.

Berikut ini adalah program-program daerah/sektoral dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang di biayai oleh APBD murni.

Tabel 4.1 Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022, Kabupaten Mojokerto.

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.01 BIDANG PENDIDIKAN | | | 134.453.438.500 | 66.225.147.741 | 49,26 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN. | | 134.453.438.500 | 66.225.147.741 | 49,26 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. | | 70.865.458.500 | 28.084.280.615 | 39,63 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.01.26 | Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar. | Honor pendidik dan tenaga kependidikan | 10.075.698.500 | 2.871.770.000 | 28,50 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.01.28 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. | Pertemuan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah | 780.000.000 | 384.487.108 | 49,29 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.01.29 | Pengelolaan dana BOS sekolah dasar. | Dana BOS sekolah dasar | 60.009.760.000 | 24.828.023.507 | 41,37 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. | | 40.874.150.000 | 16.815.106.111 | 41,14 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.02.27 | Pengadaan perlengkapan sekolah. | Peralatan sekolah gratis | 100.000.000 | 95.902.000 | 95,90 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.02.39 | Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama. | Honor pendidik dan tenaga kependidikan | 1.527.150.000 | 514.010.000 | 33,66 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.02.41 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. | Pertemuan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah | 265.000.000 | 67.830.950 | 25,60 | Dinas Pendidikan |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|-----------------|--|---|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.01.02.2.02.42 | Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama. | Dana BOS sekolah menengah pertama | 38.982.000.000 | 16.137.363.161 | 41,40 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | | 22.311.130.000 | 21.064.033.400 | 94,41 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.03.09 | Pengadaan perlengkapan PAUD. | Pembelian perlengkapan pendidikan PAUD | 390.000.000 | 176.571.400 | 45,27 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.03.11 | Penyediaan biaya personil peserta didik PAUD. | Biaya sekolah gratis | 21.260.030.000 | 20.479.642.000 | 96,33 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.03.15 | Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD | Honor pendidik dan tenaga kependidikan | 261.100.000 | 22.200.000 | 8,50 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.03.17 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD | Pertemuan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah | 400.000.000 | 385.620.000 | 96,41 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan. | | 402.700.000 | 261.727.615 | 64,99 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.04.14 | Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan | Honor pendidik dan tenaga kependidikan | 102.700.000 | 20.100.000 | 19,57 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02.2.04.16 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal / kesetaraan | Pertemuan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah | 300.000.000 | 241.627.615 | 80,54 | Dinas Pendidikan |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|------------------------------|--|--|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.02 BIDANG KESEHATAN | | | 24.751.514.400 | 22.924.062.454 | 92,62 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. | | 24.751.514.400 | 22.924.062.454 | 92,62 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. | | 24.751.514.400 | 22.924.062.454 | 92,62 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. | Pemberian susu untuk peningkatan kondisi umum penderita TB (19.698 susu x Rp. 13.459). | 275.400.000 | 265.095.654 | 96,26 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat. | ♦ Pemberian susu bubuk (180 Gr 6120 kotak x Rp. 49.000). | 394.434.000 | 299.880.000 | 76,03 | Dinas Kesehatan |
| | | ♦ Pemberian susu tinggi lalori protein pada Gizi Buruk dan Gizi Kurang (2.900 kaleng x Rp. 190.000). | 696.000.000 | 551.000.000 | 79,17 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.26 | Pengellaan jaminan kesehatan masyarakat. | ♦ Premi PBID jumlah 141.977 org x 35.000. | 18.818.870.000 | 16.782.338.000 | 89,18 | Dinas Kesehatan |
| | | ♦ Premi PBID jumlah 141.977 org x 2.800. | 1.505.509.600 | 1.341.328.800 | 89,09 | Dinas Kesehatan |
| | | ♦ Subsidi kelas III jumlah 107.599 org x 2.800. | 2.937.300.800 | 3.612.420.000 | 122,98 | Dinas Kesehatan |
| | | ♦ Visum 72 orang x 100.000. | 124.000.000 | 72.000.000 | 58,06 | Dinas Kesehatan |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.03 BIDANG PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG | | | 7.994.180.200 | 3.057.020.527 | 38,24 | |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM. | | 5.379.232.700 | 1.265.799.867 | 23,53 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. | | 5.379.232.700 | 1.265.799.867 | 23,53 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.03.2.01.18 | Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan. | Pembangunan pipa air bersih | 2.271.754.000 | 535.895.675 | 23,59 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.03.2.01.19 | Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan. | Perluasan pipa air bersih | 3.107.478.700 | 729.904.192 | 23,49 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | 2.614.947.500 | 1.791.220.660 | 68,50 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.05.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | 2.614.947.500 | 1.791.220.660 | 68,50 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.05.2.01.06 | Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat. | Pembangunan TPA Pemeliharaan TPA | 2.614.947.500 | 1.791.220.660 | 68,50 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGA RAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|--|------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.04 BIDANG PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN | | | 95.000.000 | 67.031.000 | 70,56 | |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | 95.000.000 | 67.031.000 | 70,56 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| 1.04.03.2.02.03 | Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh | Pembinaan KSM | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dgn Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | 65.000.000 | 37.031.000 | 56,97 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| 1.04.03.2.03.02 | Perbaiki rumah tidak layak huni. | Pembangunan RTLH | 65.000.000 | 37.031.000 | 56,97 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGA RAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.06 BIDANG SOSIAL | | | 1.000.000.000 | 711.034.068 | 71,10 | |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | 250.000.000 | 221.641.108 | 88,66 | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. | | 250.000.000 | 221.641.108 | 88,66 | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan permakanan | Pemberina makanan | 150.000.000 | 143.500.660 | 95,67 | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.01.03 | Penyediaan alat bantu. | Bantuan kursi roda | 100.000.000 | 78.140.448 | 78,14 | Dinas Sosial |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | 600.000.000 | 442.491.310 | 73,75 | Dinas Sosial |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. | | 600.000.000 | 442.491.310 | 73,75 | Dinas Sosial |
| 1.06.05.2.02.01 | Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. | Verifikasi dan validasi data | 300.000.000 | 192.638.570 | 64,21 | Dinas Sosial |
| 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. | Fasilitasi penyaluran bantuan sosial | 300.000.000 | 249.852.740 | 83,28 | Dinas Sosial |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | 150.000.000 | 46.901.650 | 31,27 | Dinas Sosial |
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab./Kota. | | 150.000.000 | 46.901.650 | 31,27 | Dinas Sosial |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGA RAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan makanan. | Pemberina makanan | 100.000.000 | 16.274.650 | 16,27 | Dinas Sosial |
| 1.06.06.2.01.03 | Penyediaan tempat penampungan pengungsi. | Pengadaan peralatan pengungsian | 50.000.000 | 30.627.000 | 61,25 | Dinas Sosial |
| 2.07 BIDANG TENAGA KERJA | | | 1.160.000.000 | 546.361.350 | 47,10 | |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA dan PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | 1.035.000.000 | 546.361.350 | 52,79 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. | | 985.000.000 | 509.518.650 | 51,73 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.03.2.01.01 | Proses pelaksanaan pendidikan & pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. | Pelatihan ketrampilan kerja | 985.000.000 | 509.518.650 | 51,73 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | 50.000.000 | 36.842.700 | 73,69 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.03.2.02.01 | Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta | Monitoring lembaga pelathan kerja swasta | 50.000.000 | 36.842.700 | 73,69 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA. | | 25.000.000 | 6.520.000 | 26,08 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.04.2.01 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota. | | 25.000.000 | 6.520.000 | 26,08 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.04.2.01.05 | Perluasan kesempatan kerja. | | 25.000.000 | 6.520.000 | 26,08 | Dinas Tenaga Kerja |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. | Pelaksanaan Job Fair | 100.000.000 | 83.864.900 | 83,86 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.04.2.03.03 | Job fair/bursa kerja. | | 100.000.000 | 83.864.900 | 83,86 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | 100.000.000 | 60.054.100 | 60,05 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. | Biaya operasional | 100.000.000 | 60.054.100 | 60,05 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota. | | 25.000.000 | 4.473.600 | 17,89 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.05.2.02.05 | Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja. | | 75.000.000 | 55.580.500 | 74,11 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.08 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK | | | 155.000.000 | 144.790.400 | 93,41 | |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | 125.000.000 | 117.031.400 | 93,63 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |
| 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. | | 50.000.000 | 49.368.600 | 98,74 | |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|--|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.08.03.2.01.01 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota. | Pertemuan-pertemuan koordinasi | 50.000.000 | 49.368.600 | 98,74 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |
| 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota. | | 75.000.000 | 67.662.800 | 90,22 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |
| 2.08.03.2.02.01 | Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota. | Pengelolaan pengaduan masyarakat | 50.000.000 | 42.959.500 | 85,92 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |
| 2.08.03.2.02.02 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota. | Pertemuan-pertemuan koordinasi | 25.000.000 | 24.703.300 | 98,81 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | 30.000.000 | 27.759.000 | 92,53 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |
| 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yg Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. | | 10.000.000 | 9.403.000 | 94,03 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|-----------------|---|--|--------------------------|-----------|----------------------|--|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.08.07.2.01.01 | Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota. | Pertemuan-pertemuan koordinasi | 10.000.000 | 9.403.000 | 94,03 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |
| 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. | | 10.000.000 | 9.416.000 | 94,16 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |
| 2.08.07.2.02.01 | Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota. | Pengelolaan layanan pengaduan masyarakat | 10.000.000 | 9.416.000 | 94,16 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |
| 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. | | 10.000.000 | 8.940.000 | 89,40 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |
| 2.08.07.2.03.01 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota. | Pertemuan-pertemuan koordinasi | 10.000.000 | 8.940.000 | 89,40 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pem-berdayaan Perempuan |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.09 BIDANG PANGAN | | | 3.743.791.000 | 1.315.177.100 | 35,13 | |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN | | 2.100.000.000 | 565.720.000 | 26,94 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. | | 2.100.000.000 | 565.720.000 | 26,94 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.02.2.01.01 | Penyediaan infrastruktur lumbung pangan | Perluasan jaringan infrastruktur lumbung pangan | 2.100.000.000 | 565.720.000 | 26,94 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | 1.618.791.000 | 736.855.100 | 45,52 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dgn Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. | | 733.791.000 | 253.838.700 | 34,59 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.03.2.01.02 | Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal | | 283.791.000 | 174.254.800 | 61,40 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.03.2.01.04 | Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan | Sidak pasar/pasokan dan harga pangan | 50.000.000 | 36.741.000 | 73,48 | Dinas Pangan Perikanan |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGA RAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|-----------------|--|--|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.09.03.2.01.06 | Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia. | | 400.000.000 | 42.842.900 | 10,71 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. | | 400.000.000 | 390.757.500 | 97,69 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.03.2.02.03 | Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota. | Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten | 400.000.000 | 390.757.500 | 97,69 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. | | 485.000.000 | 92.258.900 | 19,02 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. | Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat | 485.000.000 | 92.258.900 | 19,02 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.04 | PROG PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | 25.000.000 | 12.602.000 | 50,41 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 25.000.000 | 12.602.000 | 50,41 | Dinas Pangan Perikanan |
| 2.09.04.2.02.01 | Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. | Pertemuan-pertemuan koordinasi | 25.000.000 | 12.602.000 | 50,41 | Dinas Pangan Perikanan |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|--|--------------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.12 BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL | | | 667.772.000 | 379.972.250 | 56,90 | |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | 517.772.000 | 307.415.000 | 59,37 | Dnas Dukcapil |
| 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk. | | 517.772.000 | 307.415.000 | 59,37 | Dnas Dukcapil |
| 2.12.02.2.01.02 | Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk. | Pendataan penduduk | 517.772.000 | 307.415.000 | 59,37 | Dnas Dukcapil |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | 150.000.000 | 72.557.250 | 48,37 | Dnas Dukcapil |
| 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. | | 150.000.000 | 72.557.250 | 48,37 | Dnas Dukcapil |
| 2.12.04.2.01.01 | Pengolahan dan penyajian data kependudukan. | Peningkatan pelayanan pendataan penduduk | 150.000.000 | 72.557.250 | 48,37 | Dnas Dukcapil |
| 2.13 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA: | | | 102.158.100.000 | 102.141.266.350 | 99,98 | |
| 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA. | | 130.000.000 | 121.776.850 | 93,67 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa. | | 130.000.000 | 121.776.850 | 93,67 | |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|-----------------|--|---|--------------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.13.03.2.01.01 | Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota. | Pembinaan dan fasilitasi pembentukan BUMDESMA dari hasil PNPM Mandiri Perdesaan BUMDESMA memberikan pinjaman dan modal usaha pada RTM dgn jasa rendah dan tanpa agunan, BUMDESMA juga memberi Dana Sosial u/RTM yg ada di Desa berupa sembako, khitanan masal, bantuan anak yatim, dll. | 130.000.000 | 121.776.850 | 93,67 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. | | 101.759.350.000 | 101.750.752.400 | 99,99 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga-raan Administrasi Pemerintahan Desa. | | 101.759.350.000 | 101.750.752.400 | 99,99 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa. | Penyaluran dana desa untuk BLT (pagu dana desa TA Rp. 253.872.807.000) | 101.595.600.000 | 101.595.600.000 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.04.2.01.08 | Fasilitasi Pengembangan BUMDESA | Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan Pengelola BUMDESA di Kabupaten Mojokerto. | 163.750.000 | 155.152.400 | 94,75 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. | | 268.750.000 | 268.737.100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|--|--|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yg Sama dlm Daerah Kabupaten/Kota. | | 268.750.000 | 268.737.100 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi desa. | Peningkatan usaha ekonomi masyarakat fasilitasi penyaluran program Jatim Puspa. | 68.750.000 | 68.737.100 | 99,98 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Pelatihan kepribadian dan beauty class. 2 Pelatihan olahan frozen food. | 200.000.000 | 200.000.000 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.17 BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | 2.495.000.000 | 2.473.067.580 | 99,12 | |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI. | | 50.000.000 | 48.987.100 | 97,97 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. | | 50.000.000 | 48.987.100 | 97,97 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|-----------------|--|---|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.17.04.2.01.01 | Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota. | Penilaian tingkat kesehatan koperasi untuk menentukan koperasi tersebut layak /tidak memberikan pinjaman kepada anggotanya | 50.000.000 | 48.987.100 | 97,97 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM). | | 50.000.000 | 49.343.980 | 98,69 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. | | 50.000.000 | 49.343.980 | 98,69 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 2.17.04.2.01.01 | Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro | Pendataan sentra-sentra usaha mikro yang potensial sehingga dapat ditentukan intervensi kebijakan yang tepat untuk pengembangannya. | 50.000.000 | 49.343.980 | 98,69 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 2,17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM. | | 2.395.000.000 | 2.374.736.500 | 99,15 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 2,17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil. | | 2.395.000.000 | 2.374.736.500 | 99,15 | |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGARAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2,17.08.2.01.01 | Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi. | <ul style="list-style-type: none"> Klinik bisnis koperasi & usaha mikro, yaitu layanan pendampingan usaha, baik dari sisi legalitas, produk maupun pelatihan bagi calon wirausaha baru. Bantuan sosial tunai bagi pelaku usaha mikro sektor perdagangan, sbg antisipasi inflasi atas dampak kenaikan harga BBM (amanat pemerintah pusat dgn menggunakan DTU 2%. | 95.000.000 | 90.782.500 | 95,56 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| | | | 2.300.000.000 | 2.283.954.000 | 99,30 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 3.26 BIDANG PARIWISATA | | | 1.100.874.560 | 579.641.728 | 52,65 | |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | 1.100.874.560 | 579.641.728 | 52,65 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata |
| 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | 1.100.874.560 | 579.641.728 | 52,65 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata |

Lanjutan Tabel 4.1

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | AKTIVITAS | TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) | | KINERJA ANGGA RAN (%) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|-----------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| | | | RENCANA | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3.26.02.2.02.03 | Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota. | Promosi pariwisata | 1.100.874.560 | 579.641.728 | 52,65 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata |

Sumber: *Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto*

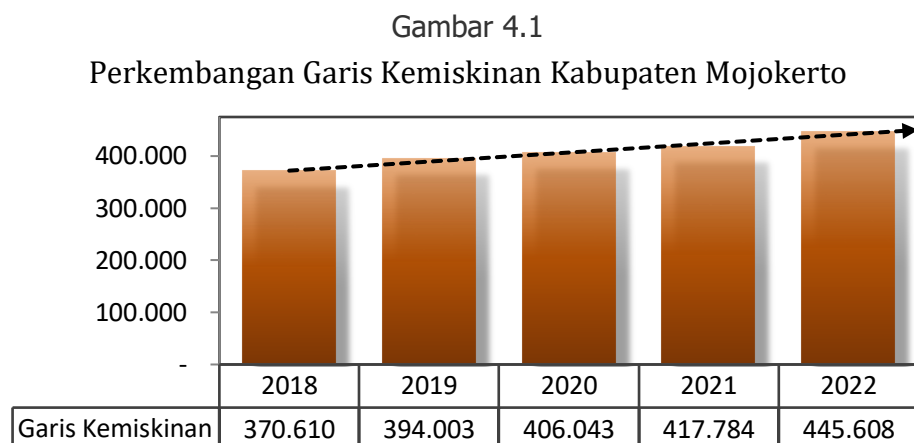
4.2. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan.

4.2.1. Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk mengetahui capaian kinerja penanggulangan konsumsi adalah dengan melihat perkembangan Garis Kemiskinan (GK), Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

1) Garis Kemiskinan (GK).

Garis kemiskinan adalah standar minimum rata-rata pengeluaran (dalam rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan. Pada tahun 2022, garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto adalah sebesar Rp. 445.608 per kapita per bulan, angka ini meningkat dari tahun 2021 yang sebesar Rp. 417.784



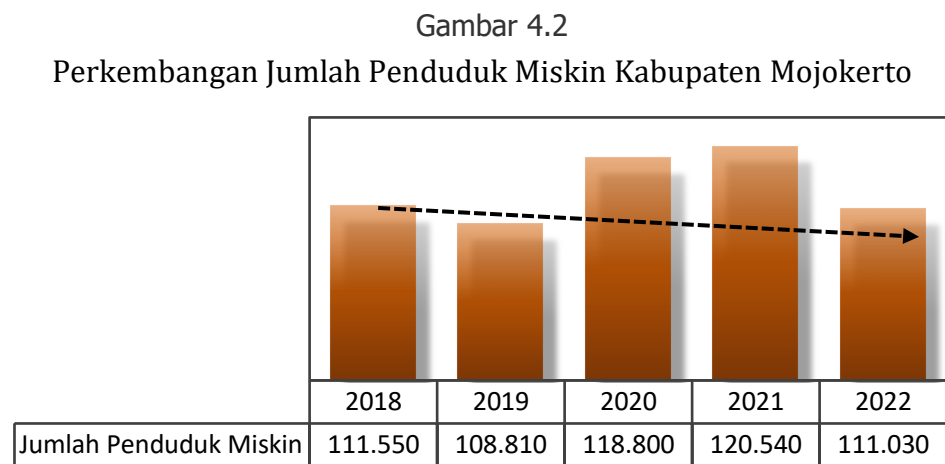
Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Karena perkembangan rata-rata harga kebutuhan makanan dan harga kebutuhan bukan makanan dari tahun ke tahun umumnya senantiasa

meningkat, maka perkembangan garis kemiskinan dari tahun ke tahun juga meningkat.

2) Jumlah Penduduk Miskin.

Berdasarkan besaran nilai garis kemiskinan tahun 2022 di Kabupaten Mojokerto, maka jumlah penduduk miskin yaitu penduduk yang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan per bulan di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah berjumlah 111.030 jiwa. Jumlah ini turun sebanyak 9.510 jiwa dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021. Sementara itu, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto selama tahun 2018-2022 sebagaimana grafik gambar 4.2 berikut.



Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, pola perkembangan pada 3 sampai 5 tahun ke belakang (tahun 2018-2022) menunjukkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* yang menurun.

Meski garis kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan pendapatan penduduk (PDRB per kapita) sedikit banyak membawa pengaruh pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 4.2
Perkembangan Capaian Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan PDRB per Kapita di Kabupaten Mojokerto

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Garis Kemiskinan | Rp. | 370.610 | 394.003 | 406.043 | 417.784 | 445.608 |
| Jumlah Penduduk Miskin | Jiwa | 111.550 | 108.810 | 118.800 | 120.540 | 111.030 |
| PDRB ADHK 2010 per kapita | Ribu Rp. | 49.838,29 | 52.310,80 | 51.330,60 | 54.485,14 | 56.193,31 |

Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Tabel 4.2 di atas dapat memperkuat dugaan, bahwa berakhirnya pandemi Covid-19 pada tahun 2022 memberi dampak pada peningkatan pendapatan penduduk, sehingga jumlah penduduk miskin di tahun 2022 mengalami penurunan. Penurunan jumlah penduduk miskin tidak hanya terjadi di Kabupaten Mojokerto, tetapi terjadi secara Nasional. Dimana jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 26,16 juta jiwa, turun dari tahun 2020 yang sebanyak 27,54 juta.

3) Persentase Penduduk Miskin (P0).

Dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 yang sebanyak 111.030 jiwa, maka diketahui persentase penduduk miskin

di Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 9,71 persen. Persentase ini tentunya menurun, dengan penurunan sebesar 0,91 persen terhadap persentase penduduk miskin di tahun 2021.

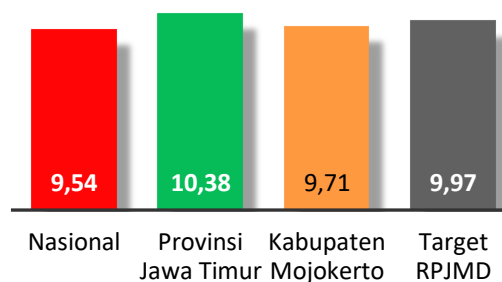
Sebagaimana *trend* perkembangan jumlah penduduk miskin, maka perkembangan persentase penduduk miskin selama kurun waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun ke belakang juga menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan *trend* yang menurun.

Bila melihat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 10,38 persen, sedangkan persentase penduduk miskin Nasional adalah sebesar 9,54 persen, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto berada

pada kategori sedang, karena persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto lebih rendah terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, tetapi masih lebih tinggi terhadap capaian Nasional.

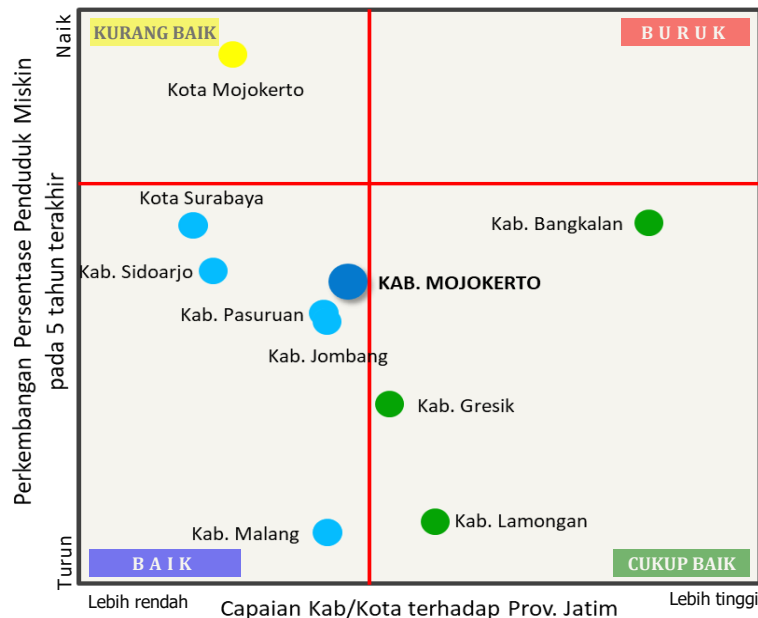
Posisi relatif Kabupaten Mojokerto di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menurut kategori capaian dan perkembangan capaian persentase penduduk miskin sebagaimana ditampilkan pada gambar 4.5.

Gambar 4.4
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2022



Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Gambar 4.5
Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
menurut Kategori Capaian Persentase Kemiskinan Tahun 2022
dan Perkembangan Capaian Persentase Kemiskinan Tahun 2018-2022



Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Gambar 4.5 di atas memberikan gambaran sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (tepatnya di wilayah Gerbangkertasusila) dengan menggunakan data capaian persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota tersebut pada tahun 2022 sebagai nilai x, data-data *trend* perkembangan persentase penduduk miskin seluruh Kabupaten/Kota tersebut selama tahun 2018-2022 sebagai nilai y, pada sebuah diagram kartesius yang menggunakan titik 0 (nol) yang menjadi sumbu x pada bidang kuadran sebagai pembatas antara bidang yang menunjukkan *trend* meningkat dan *trend* menurun, serta capaian persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2022 menjadi sumbu y yang merupakan pembatas antara kondisi capaian lebih tinggi atau lebih rendah dari

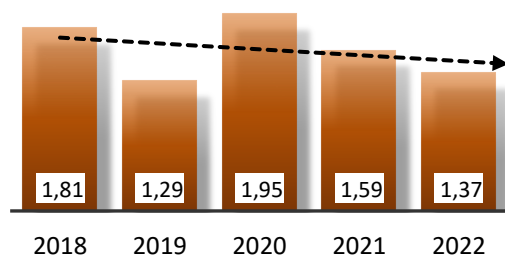
capaian Provinsi. Berdasarkan gambar tersebut, Kabupaten Mojokerto berada pada kategori baik, artinya persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto memiliki *trend* perkembangan yang cenderung menurun dengan capaian persentase penduduk miskin berada di bawah/lebih rendah dari capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur.

4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Capaian nilai indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2022 adalah sebesar 1,37 persen. Nilai capaian ini meng-

Gambar 4.6
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mojokerto



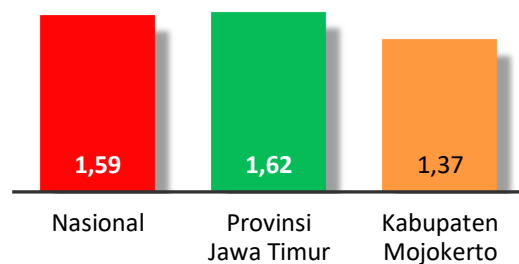
Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Mojokerto cenderung semakin mendekati garis kemiskinan sehingga ketimpangan pengeluaran penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya juga semakin mengecil.

alami penurunan dibandingkan capaian di tahun 2021 yang sebesar 1,59 persen. Dengan turunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten

Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1,62 persen sedangkan indeks kedalaman kemiskinan secara Nasional adalah sebesar 1,59 persen. Dengan demikian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Mojokerto pada tahun ini berada pada kategori rendah, karena capaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Mojokerto lebih tinggi terhadap indeks kedalaman kemiskinan Provinsi maupun secara Nasional.

Gambar 4.7
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mojokerto terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2022

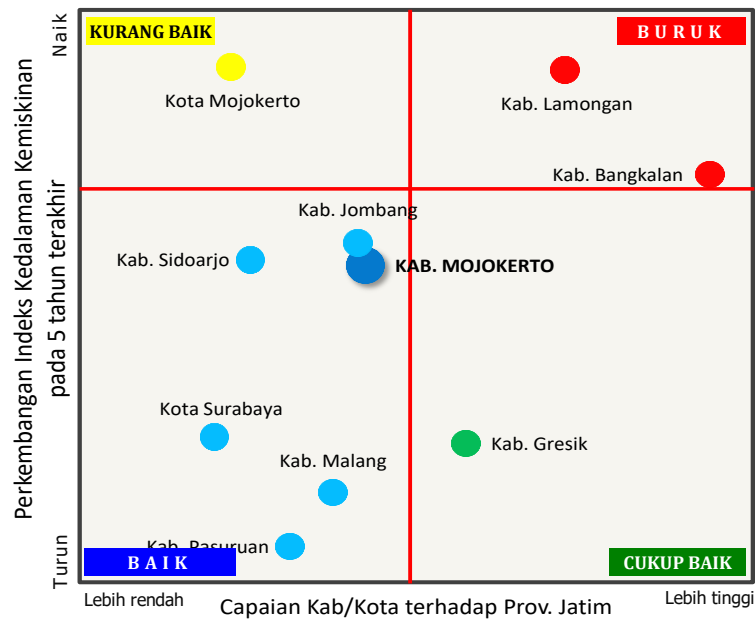


Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Posisi relatif Kabupaten Mojokerto di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menurut kategori capaian dan perkembangan capaian indeks kedalaman kemiskinan sebagaimana ditampilkan pada gambar 4.8.

Berdasarkan gambar 4.8 di atas, Kabupaten Mojokerto berada pada kategori baik, artinya nilai indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Mojokerto memiliki *trend* perkembangan yang cenderung menurun dengan capaian indeks kedalaman kemiskinan berada di bawah/lebih rendah dari capaian di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 4.8
Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
menurut Kategori Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2022
dan Perkembangan Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan
Tahun 2018-2022



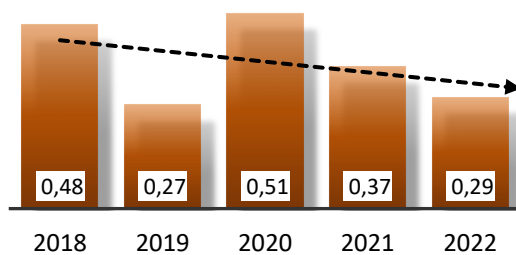
Sumber: Publikasi BPS – data di olah

5) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Capaian kinerja indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2022 adalah sebesar 0,29 persen. Capaian kinerja ini mengalami penurunan terhadap capaian di tahun 2021 yang sebesar 0,37

Gambar 4.9.
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto



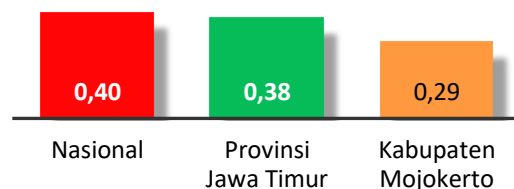
Sumber: Publikasi BPS – data di olah

persen. Dengan menurunnya nilai indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin Kabupaten Mojokerto cenderung semakin menyempit sehingga ketimpangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya juga semakin mengecil.

Pada tahun 2022 capaian indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,38 persen, sedangkan capaian indeks keparahan kemiskinan secara Nasional sebesar 0,40 persen. Dengan

demikian indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto berada pada kategori rendah, karena indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mojokerto masih lebih rendah terhadap indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

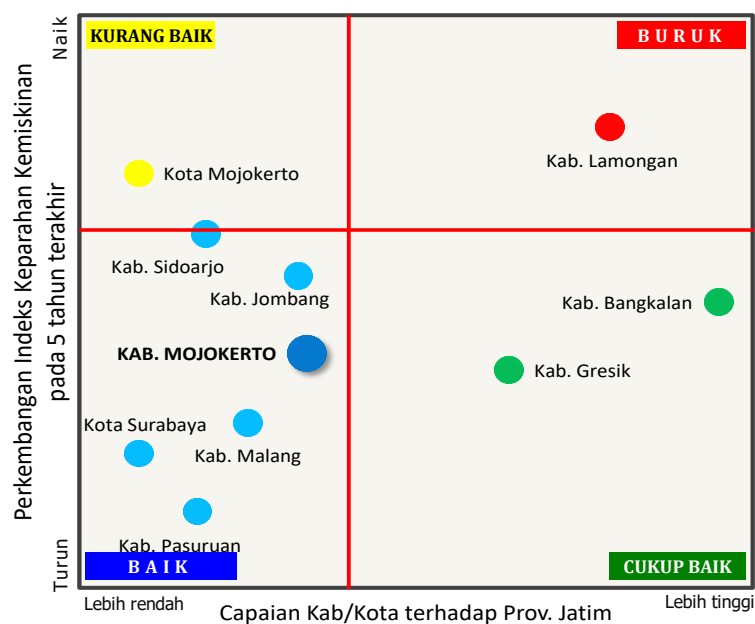
Gambar 4.10
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Mojokerto terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2022



Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Posisi relatif Kabupaten Mojokerto di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menurut kategori capaian dan perkembangan capaian indeks keparahan kemiskinan sebagaimana ditampilkan pada gambar 4.11.

Gambar 4.11
Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menurut Kategori Capaian Indeks Keparahhan Kemiskinan Tahun 2022 dan Perkembangan Capaian Indeks Keparahhan Kemiskinan Tahun 2018-2022



Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Berdasarkan gambar 4.11 di atas, Kabupaten Mojokerto berada pada kategori baik, artinya nilai indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mojokerto memiliki *trend* perkembangan yang cenderung menurun dengan capaian indeks kedalaman kemiskinan berada di bawah/lebih rendah dari capaian di Provinsi Jawa Timur.

Dari seluruh uraian capaian kinerja Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di atas, diperoleh data-data perkembangan capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Perkembangan Capaian Kinerja P0, P1, dan P2
Kabupaten Mojokerto

| Indikator | Sat | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------|------|-------|-------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Persentase Penduduk Miskin (P0) | % | 10,08 | 9,75 | 10,57 | 10,62 | 9,71 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | % | 1,81 | 1,29 | 1,95 | 1,59 | 1,37 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | % | 0,48 | 0,27 | 0,51 | 0,37 | 0,29 |

Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2022 diikuti dengan menurunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja program penanggulangan kemiskinan baik program Nasional dan Provinsi Jawa Timur maupun program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mojokerto mampu menurunkan angka kemiskinan, sekaligus masih mampu menjaga penduduk miskin untuk tidak lebih terpuruk kejurang kemiskinan. Kondisi capaian kinerja indikator makro penanggulangan kemiskinan di tahun 2022 terutama

adalah karena telah berakhirnya masa pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 dan tahun 2021.

4.2.2. Capaian Kinerja Tahunan Indikator Terkait Isu Kemiskinan.






















Untuk mengetahui capaian kinerja indikator tahunan terkait isu kemiskinan adalah dengan melihat perkembangan kinerja pada indikator-indikator bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan indikator infrastruktur dasar. Indikator-indikator tersebut di analisis capaian kinerjanya pada tahun 2022 terhadap capaian kinerja tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional, pada tahun yang sama. Untuk mengetahui apakah capaian kinerja indikator-indikator tersebut lebih baik atau lebih buruk terhadap Provinsi dan Nasional.

Selain itu juga dilakukan analisa perkembangan antar waktu (*time series*) selama kurun waktu tahun 2018-2022, untuk mengetahui apakah capaian kinerja tahun 2022 lebih baik ataukah lebih buruk terhadap capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, juga untuk mengetahui kecenderungan pola perkembangannya.











1) Capaian Kinerja terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian kinerja indikator tahunan terkait isu kemiskinan di Kabupaten Mojokerto tahun 2021 apabila disandingkan dengan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun yang sama adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Posisi Relatif Capaian Kinerja Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan
Kabupaten Mojokerto terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2022

| Bidang / Indikator | Sat | Capaian Kinerja Tahun 2022 | | |
|---------------------------|-----|---|---------------------|----------|
| | | Kabupaten Mojokerto | Provinsi Jawa Timur | Nasional |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pendidikan: | | | | |
| ▪ APM SD sederajat | % | 95,60  | 98,09 | 97,88 |
| ▪ APM SMP sederajat | % | 83,89  | 83,80 | 80,82 |
| ▪ APM SMA sederajat | % | 74,95  | 62,10 | 61,73 |
| ▪ APtS usia 7-12 tahun | % | 0,000  | 0,25 | 0,71 |
| ▪ APtS usia 13-15 tahun | % | 0,000  | 2,43 | 6,94 |
| ▪ APtS usia 16-18 tahun | % | 0,030  | 7,88 | 22,52 |
| ▪ Rata-rata lama sekolah | th. | 8,97  | 8,03 | 9,08 |
| ▪ Harapan lama sekolah | th. | 12,96  | 13,37 | 13,10 |
| ▪ AMH penduduk usia 15+ | %. | 96,41  | 92,56 | 96,35 |
| Kesehatan: | | | | |
| ▪ AKN per 1000 KH | | 3,10  | 5,15 | 4,24 |
| ▪ AKB per 1000 KH | | 4,50  | 6,29 | 5,52 |
| ▪ AKBA per 1000 KH | | 0,60  | 6,73 | 8,61 |
| ▪ AKI per 100.000 KH | | 43,70  | 98,40 | 97,61 |
| ▪ Balita gizi buruk | % | 0,30  | 7,97 | 8,90 |
| ▪ Balita gizi kurang | % | 2,40  | 9,82 | 13,80 |
| ▪ Balita stunting | % | 3,90  | 12,38 | 14,00 |
| ▪ Imunisasi dasar pd bayi | % | 100,00  | 69,74 | 61,09 |
| ▪ Persalinan oleh nakes | % | 100,00  | 98,32 | 95,79 |
| ▪ Persalinan di fasyankes | % | 100,00  | 96,28 | 90,21 |
| ▪ Rasio Bidan /100rb pend | | 72,00  | 63,25 | 62,44 |
| ▪ Usia harapan hidup | th. | 72,93  | 71,74 | 71,58 |

Lanjutan Tabel 4.4

| Bidang / Indikator | Sat | Capaian Kinerja Tahun 2022 | | |
|---|-----|--|---------------------|----------|
| | | Kabupaten Mojokerto | Provinsi Jawa Timur | Nasional |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Ketenagakerjaan: | | | | |
| ▪ TPT | % | 4,83  | 5,49 | 5,86 |
| ▪ Penduduk usia kerja <i>idle</i> | % | 22,74  | 23,32 | 24,42 |
| Infrastruktur Dasar: | | | | |
| ▪ Akses air minum layak | % | 97,05  | 95,05 | 91,05 |
| ▪ Akses sanitasi layak | % | 94,80  | 81,13 | 80,92 |
| ▪ Akses penerangan listrik | % | 100,00  | 99,98 | 99,39 |
| ▪ Rumah milik sendiri | % | 94,87  | 88,14 | 83,99 |
| ▪ Luas rumah ≥ 8 m ² /kap | % | 99,27  | 97,88 | 92,86 |
| ▪ Rumah tidak layak huni | % | 5,09  | 33,72 | 33,34 |
| Ketahanan Pangan: | | | | |
| ▪ Produktivitas padi | | 59,16  | 56,82 | 52,38 |
| ▪ Angka rawan pangan | % | 2,00  | 3,16 | 4,85 |

Sumber: di olah dari berbagai sumber

Dari tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa:

- a) Pada bidang pendidikan dari 9 (tujuh) indikator yang ditampilkan, 2 (dua) indikator yaitu indikator APM SD/MI sederajat dan indikator HLS (Haapan Lama Sekolah) menunjukkan capaian kinerja yang lebih rendah/lebih buruk (berlabel MERAH) terhadap capaian kinerja di tingkat Provinsi maupun capaian kinerja secara Nasional. Sedangkan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan capaian kinerja diantara capaian di tingkat Provinsi maupun secara

Nasional (berlabel KUNING). Indikator-indikator tersebut perlu mendapat perhatian untuk dirumuskan rencana perbaikan di tahun depan, terutama yang berlabel merah. Sementara itu untuk indikator lainnya telah menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik (berlabel HIJAU) terhadap capaian di tingkat Provinsi maupun secara Nasional.

- b) Pada bidang kesehatan, dari 12 (dua belas) indikator yang ditampilkan, seluruh indikator telah menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik (berlabel HIJAU), baik terhadap capaian kinerja di tingkat Provinsi maupun capaian kinerja secara Nasional.
- c) Pada bidang ketenagakerjaan, posisi relatif capaian kinerja TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2022 sudah lebih rendah/lebih baik terhadap capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun terhadap capaian kinerja Nasional. Dengan kata lain, TPT di Kabupaten Mojokerto berada pada kategori rendah (berlabel HIJAU). Demikian juga dengan capaian kinerja penduduk usia kerja *idle* yang juga berlabel KUNING.
- d) Pada dimensi infrastruktur dasar rumah tangga, semua indikator yang ditampilkan telah berlabel HIJAU, artinya telah menunjukkan capaian kinerja dengan posisi relatif yang lebih baik terhadap capaian di Provinsi Jawa Timur maupun capaian kinerja Nasional.
- e) Pada ketahanan pangan, dari 2 (dua) indikator yang ditampilkan, keduanya menunjukkan capaian kinerja dengan posisi relatif yang

sudah lebih baik (berlabel HIJAU) terhadap capaian kinerja di tingkat Provinsi maupun secara Nasional.

2) Capaian Kinerja Antar Waktu.

Data perkembangan capaian kinerja tahunan pada indikator-indikator tahunan terkait isu kemiskinan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, dan bidang ketahanan pangan selama kurun waktu tahun 2018-2022. Data capaian kinerja tersebut adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Perkembangan Antar Waktu
Capaian Kinerja Indikator terkait Isu Kemiskinan

| Dimensi / Indikator | Sat | Capaian Kinerja Tahun | | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Pendidikan: | | | | | | |
| ▪ APM SD sederajat | % | 99,49 | 99,75 | 97,78 | 97,25 | 95,60 |
| ▪ APM SMP sederajat | % | 83,55 | 98,08 | 83,84 | 83,31 | 83,89 |
| ▪ APM SM sederajat | | 78,97 | 80,31 | 75,47 | 75,60 | 74,95 |
| ▪ APtS usia 7-12 tahun | % | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ▪ APtS usia 13-15 tahun | % | 0,028 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
| ▪ APtS usia 16-18 tahun | | 0,038 | 0,032 | 0,032 | 0,030 | 0,030 |
| ▪ Rata-rata lama sekolah | th. | 8,18 | 8,49 | 8,51 | 8,64 | 8,97 |
| ▪ Harapan lama sekolah | th. | 12,53 | 12,61 | 12,88 | 12,95 | 12,96 |
| ▪ AMH penduduk usia 15+ | % | 96,36 | 95,53 | 96,07 | 95,25 | 96,41 |

Lanjutan tabel 4.5

| Dimensi / Indikator | Sat | Capaian Kinerja | | | | |
|--|-----|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Kesehatan: | | | | | | |
| ▪ AKN per 1000 KH | | 6,67 | 5,38 | 3,85 | 3,60 | 3,10 |
| ▪ AKB per1000 KH | | 8,61 | 6,81 | 4,58 | 0,80 | 4,50 |
| ▪ AKBA per 1000 KH | | 0,48 | 0,60 | 0,06 | 0,10 | 0,60 |
| ▪ AKI per 100.000 KH | | 113,56 | 89,60 | 114,40 | 418,00 | 43,70 |
| ▪ Balita gizi buruk | % | 0,27 | 0,30 | 0,68 | 0,30 | 0,30 |
| ▪ Balita gizi kurang | % | 6,09 | 5,49 | 7,60 | 3,70 | 2,40 |
| ▪ Balita stunting | % | | 9,40 | 6,82 | 5,32 | 3,90 |
| ▪ Imunisasi dasar lengkap pada bayi | % | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ▪ Persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan | % | 100,00 | 98,49 | 94,64 | 100,00 | 100,00 |
| ▪ Persalinan di lakukan di fasilitas kesehatan | | 98,14 | 98,18 | 94,61 | 92,14 | 100,00 |
| ▪ Rasio bidan per 100.000 penduduk | | 29,85 | 49,48 | 58,06 | 62,30 | 72,00 |
| ▪ Usia harapan hidup | th. | 72,24 | 72,43 | 72,53 | 72,59 | 72,93 |
| Ketenagakerjaan: | | | | | | |
| ▪ TPT | % | 4,27 | 4,68 | 5,75 | 5,54 | 4,83 |
| ▪ Penduduk usia <i>idle</i> | % | 21,47 | 23,30 | 24,05 | 23,72 | 22,74 |
| Infrastruktur Dasar: | | | | | | |
| ▪ Akses air minum layak | % | 97,02 | 98,87 | 99,20 | 98,61 | 97,05 |
| ▪ Akses sanitasi layak | % | 84,96 | 91,30 | 91,02 | 93,84 | 94,80 |
| ▪ Akses penerangan listrik | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Lanjutan tabel 4.5

| Dimensi / Indikator | Sat | Capaian Kinerja | | | | |
|---|-----|-----------------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ▪ Status rumah milik sendiri | % | 94,08 | 91,64 | 92,14 | 92,23 | 94,87 |
| ▪ Luas bangunan ≥ 8 m ² | % | 99,62 | 100,00 | 98,98 | 99,05 | 99,27 |
| ▪ Rumah tidak layak huni | % | 5,57 | 5,63 | 5,39 | 5,24 | 5,09 |
| Ketahanan Pangan: | | | | | | |
| ▪ Produktivitas padi | % | 59,42 | 61,78 | 57,63 | 57,95 | 58,29 |
| ▪ Angka Rawan Pangan | % | 3,87 | 3,79 | 3,91 | 3,85 | 2,00 |

Sumber: di olah dari berbagai sumber

Berdasarkan data-data deret waktu yang disajikan pada tabel 4.5 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pada dimensi pendidikan, 2 (dua) indikator perlu menjadi perhatian untuk mendapatkan intervensi perbaikan di masa mendatang, yaitu indikator APM SD/MI sederajat dan indikator APM SMA/SMK/MA sederajat, indikator-indikator ini menunjukkan capaian kinerja tahun 2022 yang lebih buruk dari tahun sebelumnya serta dalam data deret waktu tahun 2018-2022 menampilkan pola dengan kecenderungan *trend* memburuk.

Sementara itu untuk indikator-indikatpr yang lain disamping capaian kinerja tahun 2022 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, juga telah menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan *trend* yang cenderung membaik.

- b) Pada bidang kesehatan, indikator AKBA, menunjukkan capaian kinerja tahun 2022 lebih buruk dari tahun 2021 sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan *trend* yang memburuk pula. Sementara itu indikator prevalensi Balita gizi buruk meski capaian kinerja tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021, tetapi masih menampilkan pola perkembangan antar waktu yang dengan kecenderungan *trend* yang memburuk.

Indikator-indikator yang disebutkan di atas perlu untuk mendapat perhatian guna intervensi perbaikan capaian kinerja di masa-masa mendatang. Sementara indikator-indikator yang lain, selain capaian tahun ini telah lebih baik dari tahun sebelumnya, juga telah menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan *trend* yang membaik.

- c) Pada bidang ketenagakerjaan, dari 2 (dua) indikator yang ditampilkan, yaitu indikator TPT dan indikator Penduduk Usia Kerja *idle* menunjukkan capaian kinerja di tahun 2022 lebih baik terhadap capaian kinerja di tahun 2021, hanya saja menampilkan fluktuasi perkembangan capaian kinerja antar waktu (tahun 2018-2022) dengan kecenderungan *trend* yang memburuk.
- d) Pada bidang infrastruktur dasar, indikator rumah tangga dengan akses air minum layak yang menunjukkan capaian kinerja tahun 2022 lebih buruk dari tahun sebelumnya. Dan berdasarkan data

deret waktu tahun 2018-2022, indikator ini telah menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* yang membaik.

Sementara itu pada indikator rumah dengan luas 8m² per kapita atau lebih sudah menunjukkan capaian kinerja di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, hanya saja pola perkembangan antar waktunya menunjukkan kecenderungan *trend* yang memburuk.

- e) Pada bidang ketahanan pangan, pola perkembangan antar waktu yang ditampilkan oleh indikator angka rawan pangan (ARP) meski sedikit berfluktuatif tetapi menampilkan kecenderungan *trend* yang membaik/menurun, dengan capaian kinerja tahun 2022 telah lebih baik dari tahun 2021. Sedangkan indikator produktivitas padi, meski capaian kinerja tahun 2022 sudah lebih baik terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, akan tetapi pola perkembangan antar waktu menampilkan kecenderungan *trend* yang menurun (memburuk).



**LP2KD
2022**



TKPK
Kabupaten Mojokerto



Bab 5

Penutup

2023

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



5 BAB

Penutup

5.1. Kesimpulan.

1. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan:

- Tahun 2022, jumlah penduduk miskin Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan sebesar 7,89 persen (9.510 jiwa) dibandingkan jumlah penduduk miskin di tahun 2021.
- Persentase penduduk miskin (P0) Kabupaten Mojokerto turun sebesar 0,91 persen poin, yaitu dari 10,62 persen di tahun 2021 menjadi 9,71 persen pada tahun 2022, dan capaian tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2018, sehingga perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2018-2022 menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* yang menurun/membaik.

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 lebih rendah terhadap capaian Provinsi Jawa Timur, namun masih lebih tinggi terhadap capaian secara Nasional. Capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi target RPJMD.

- ❑ Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 mengalami penurunan dari kondisi capaian di tahun 2021. Capaian P1 dan P2 pada tahun 2022 sudah lebih rendah dibandingkan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

Menurunnya (membaik) capaian kinerja P0 di Kabupaten Mojokerto yang diikuti dengan membaiknya pula capaian kinerja P1, dan P2 menjadi indikasi bahwa program penanggulangan kemiskinan yang ada mampu membendung peningkatan jumlah/persentase penduduk miskin, sekaligus mampu menjaga penduduk miskin agar tidak semakin terouruk ke jurang kemiskinan terdalam. Kondisi tersebut adalah sebagai dampak berakhirnya pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020 dan tahun 2021.

- ❑ Capaian kinerja tahunan pada indikator terkait isu kemiskinan yang menunjukkan capaian kinerja negatif, baik di tinjau dari posisi relatif capaian kinerja terhadap Provinsi dan Nasional, maupun perkembangan capaian kinerja antar waktu sebagai berikut:

Tabel 5.1
Indikator-Indikator terkait Isu Kemiskinan
dengan Capaian Kinerja Negatif

| Dimensi / Bidang | Indikator dengan Capaian Kinerja Negatif pada: | |
|---------------------|--|--|
| (1) | Posisi Relatif terhadap Provinsi dan Nasional (2) | Kinerja Antar Waktu (3) |
| Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ APM SD/MI sederajat; ▪ HLS ▪ RLS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ APM SD/MI sederajat; ▪ APM SMA/MA/SMK sederajat. |
| Kesehatan | --- | <ul style="list-style-type: none"> ▪ AKBA; ▪ Balita gizi buruk. |
| Ketenaga-kerjaan | --- | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TPT; ▪ Penduduk usia kerja idle. |
| Infrastruktur Dasar | --- | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses air minum layak; ▪ Luas rumah 8m² per kapita atau lebih. |
| Ketahanan Pangan | --- | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktivitas padi |

Sumber: Hasil analisa

Indikator-indikator sebagaimana disebutkan pada tabel di atas, perlu menjadi perhatian dalam bentuk intervensi perbaikan kinerja di masa mendatang.

2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan:

- ❑ Telah terbentuk dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto nomor 188.45/381/HK/416-012/2017, SK ini belum sesuai dengan pasal

8 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020.

- ❑ Tata kerja TKPK sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020, dalam hal penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja tahunan TKPK, meliputi: (i) rencana kerja penyusunan RPKD, (ii) rencana kerja penyusunan RAT, dan (iii) Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, telah dilaksanakan sejak tahun 2020, dengan dimulai penyusunan dokumen RPKD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025 pada Desember 2020.
- ❑ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan penanganan pengelolaan pengaduan masih perlu di tingkatkan.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan:

- ❑ Sudah banyak memiliki program-program yang terkait (langsung maupun tidak langsung) dengan penanggulangan kemiskinan, akan tetapi:
 - belum memanfaatkan analisis untuk menentukan fokus dan lokus dalam perencanaan program;
 - antar program penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan adanya *komplementaris*;
 - belum maksimal dalam memanfaatkan *database* kemiskinan (DTKS) untuk menentukan sasaran penerima manfaat program

sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020.

5.2. Rekomendasi.

1. Kepada pihak terkait:

| Ditujukan kepada | Isi Rekomendasi |
|--------------------------------|--|
| Pemerintah Kabupaten Mojokerto | memperkuat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan dilengkapi dengan peraturan pendukung maupun petunjuk pelaksanaan, misalnya: <ul style="list-style-type: none">➤ tata cara/mekanisme bagi Perangkat Daerah dalam pemanfaatan data kemiskinan terpadu (DTKS) guna menyusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan sebagainya. |
| Sekretaris TKPK | <ol style="list-style-type: none">1) memperkuat Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang memiliki kualifikasi mengelola data kemiskinan menjadi informasi yang <i>up to date</i>.2) mengembangkan sistem manajemen informasi data kemiskinan daerah terpadu dengan memanfaatkan basis data DTKS dan data lain-nya.3) optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat. |

| Ditujukan kepada | Isi Rekomendasi |
|--|--|
| Wakil Ketua dan Koordinator Kelompok Program | 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi di internal maupun antar kelompok program. 2) koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di internal kelompok program maupun antar kelompok program. 3) optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. |

- 3) Menjadikan hasil analisis prioritas wilayah sebagaimana terdapat dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2021-2025 Kabupaten Mojokerto sebagai prioritas wilayah intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fokus masalah masing-masing indikator bidang.
- 4) Sebagai usulan rencana tindak lanjut terhadap isu-isu penanggulangan kemiskinan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Usulan Rencana Tindak Lanjut

| Isu | Rencana Tindak | Pelaksana |
|---|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Isu-Isu Kelembagaan: | | |
| Belum memiliki regulasi khusus penanggulangan kemiskinan. | Menyiapkan regulasi khusus (Perda / Perbup) penanggulangan kemiskinan | Sekretaris TKPK |

Lanjutan tabel 5.2

| Isu | Rencana Tindak | Pelaksana |
|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Struktur organisasi TKPK belum sesuai Permen 53/ 2020 | Penyesuaian struktur organisasi TKPK sesuai Permendagri No. 53 Tahu 2020 | Bupati/Wakil Bupati |
| Koordinasi TKPK | Meningkatkan rapat koordinasi sesuai ketentuan Permendagri No. 53 Tahun 2020 | Ketua dan Sekretaris TKPK |
| Monev dan PPM | Meningkatkan pelaksanaan monev dan pengelolaan pengaduan | Sekretaris TKPK dan Koordinator Program pada TKPK |
| Isu-Isu Program Penanggulangan Kemiskinan: | | |
| Sasaran penerima manfaat program | Menggunakan DTKS dalam menentukan sasaran penerima manfaat program | OPD terkait program |
| | Menyiapkan regulasi | Sekretaris TKPK |





Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2011. *Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2022. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2022*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2021. *Profil Statistik Kesehatan 2021*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS..

Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022*. Jakarta: BPS.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. 2020. *Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025*. Mojokerto: Bappeda Kabupaten Mojokerto.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto 2022*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2022. *Statistik Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2022*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2022. *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2022*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2023. *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2023*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2022. Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Mojokerto 2021. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2018-2022. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2022. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2022. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2023. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2022. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2018-2022. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2023. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2023; Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. 2023. Profil Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Mojokerto: Dinkes Kabupaten Mojokerto.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2023. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Surabaya: Dinkes Jawa Timur.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Jakarta: Bappenas.
- Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Mojokerto.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2010. Panduan Praktis Analisis Data Untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: TNP2K.

Draf Final Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020.

-----, <https://www.bps.go.id/>

-----, <https://www.jatim.bps.go.id/>

-----, <https://www.kemdikbud.go.id>

-----, <http://www.kemkes.go.id>

-----, <https://Mojokertokab.bps.go.id>



Lampiran 1: Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2021.

| Kabupaten / Kota | Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) | Penduduk Miskin | | P1 | P2 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | Jumlah (jiwa) | Persentase | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kabupaten: | | | | | |
| 01. Pacitan | 309.655 | 84.190 | 15,11 | 1,66 | 0,28 |
| 02. Ponorogo | 341.090 | 89.940 | 10,26 | 1,08 | 0,18 |
| 03. Trenggalek | 358.831 | 84.890 | 12,14 | 1,46 | 0,25 |
| 04. Tulungagung | 374.183 | 78.590 | 7,51 | 0,94 | 0,18 |
| 05. Blitar | 335.573 | 112.620 | 9,65 | 0,85 | 0,14 |
| 06. Kediri | 335.990 | 184.490 | 11,64 | 1,35 | 0,25 |
| 07. Malang | 348.695 | 276.580 | 10,50 | 1,41 | 0,30 |
| 08. Lumajang | 334.906 | 105.250 | 10,05 | 1,57 | 0,34 |
| 09. Jember | 380.397 | 257.090 | 10,41 | 1,58 | 0,40 |
| 10. Banyuwangi | 387.084 | 130.930 | 8,07 | 1,32 | 0,28 |
| 11. Bondowoso | 423.150 | 115.180 | 14,73 | 2,19 | 0,49 |
| 12. Situbondo | 336.040 | 86.950 | 12,63 | 2,08 | 0,49 |
| 13. Probolinggo | 451.395 | 223.320 | 18,91 | 3,26 | 0,81 |
| 14. Pasuruan | 368.686 | 159.780 | 9,70 | 1,17 | 0,24 |
| 15. Sidoarjo | 502.524 | 137.150 | 5,93 | 0,95 | 0,25 |
| 16. Mojokerto | 417.784 | 120.540 | 10,62 | 1,59 | 0,37 |
| 17. Jombang | 421.172 | 12.730 | 10,00 | 1,55 | 0,36 |
| 18. Nganjuk | 446.232 | 125.530 | 11,85 | 1,56 | 0,31 |
| 19. Madiun | 380.287 | 81.610 | 11,91 | 1,65 | 0,38 |
| 20. Magetan | 371.182 | 67.750 | 10,66 | 1,54 | 0,37 |
| 21. Ngawi | 358.663 | 130.810 | 15,57 | 2,23 | 0,47 |
| 22. Bojonegoro | 380.653 | 166.520 | 13,27 | 1,88 | 0,45 |
| 23. Tuban | 388.176 | 192.580 | 16,31 | 3,26 | 0,86 |
| 24. Lamongan | 419.309 | 166.820 | 13,86 | 2,70 | 0,73 |
| 25. Gresik | 505.499 | 166.350 | 12,42 | 2,15 | 0,61 |
| 26. Bangkalan | 432.046 | 215.970 | 21,57 | 3,51 | 0,86 |
| 27. Sampang | 391.032 | 237.230 | 23,76 | 3,66 | 0,80 |
| 28. Pamekasan | 368.259 | 137.120 | 15,30 | 1,90 | 0,40 |
| 29. Sumenep | 400.960 | 224.730 | 20,51 | 4,73 | 1,56 |
| Kota: | | | | | |
| 71. Kediri | 506.936 | 22.550 | 7,75 | 1,03 | 0,21 |
| 72. Blitar | 481.229 | 11.330 | 7,89 | 1,06 | 0,28 |
| 73. Malang | 570.238 | 40.620 | 4,62 | 0,87 | 0,22 |
| 74. Probolinggo | 545.955 | 17.910 | 7,44 | 0,90 | 0,17 |
| 75. Pasuruan | 461.624 | 13.970 | 6,88 | 1,15 | 0,27 |
| 76. Mojokerto | 493.452 | 8.370 | 6,39 | 0,84 | 0,17 |
| 77. Madiun | 514.409 | 9.060 | 5,09 | 0,67 | 0,15 |
| 78. Surabaya | 611.466 | 152.490 | 5,23 | 0,75 | 0,17 |
| 79. Batu | 522.819 | 8.630 | 4,09 | 0,39 | 0,06 |
| Provinsi Jawa Timur | 429.133 | 4.572.730 | 11,40 | 1,84 | 0,43 |
| Indonesia | 472.525 | 27.542.770 | 10,14 | 1,71 | 0,42 |

Sumber: BPS

Lampiran 2: Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022.

| Kabupaten / Kota | Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) | Penduduk Miskin | | P1 | P2 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | Jumlah (jiwa) | Persentase | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kabupaten: | | | | | |
| 01. Pacitan | 327.758 | 76.930 | 13,80 | 1,35 | 0,23 |
| 02. Ponorogo | 362.461 | 81.800 | 9,32 | 0,99 | 0,16 |
| 03. Trenggalek | 381.448 | 76.750 | 10,96 | 1,38 | 0,28 |
| 04. Tulungagung | 391.888 | 70.520 | 6,71 | 0,66 | 0,09 |
| 05. Blitar | 355.511 | 101.940 | 8,71 | 1,33 | 0,30 |
| 06. Kediri | 353.033 | 169.460 | 10,65 | 1,67 | 0,41 |
| 07. Malang | 367.579 | 252.880 | 9,55 | 0,92 | 0,18 |
| 08. Lumajang | 352.776 | 95.040 | 9,06 | 1,34 | 0,31 |
| 09. Jember | 400.961 | 232.730 | 9,39 | 1,08 | 0,22 |
| 10. Banyuwangi | 414.879 | 122.010 | 7,51 | 1,18 | 0,25 |
| 11. Bondowoso | 449.760 | 105.690 | 13,47 | 1,62 | 0,33 |
| 12. Situbondo | 356.133 | 81.460 | 11,78 | 1,34 | 0,27 |
| 13. Probolinggo | 475.713 | 203.230 | 17,12 | 2,54 | 0,59 |
| 14. Pasuruan | 394.016 | 148.620 | 8,96 | 1,29 | 0,29 |
| 15. Sidoarjo | 523.213 | 125.690 | 5,36 | 0,84 | 0,18 |
| 16. Mojokerto | 445.608 | 111.030 | 9,71 | 1,37 | 0,29 |
| 17. Jombang | 448.830 | 115.480 | 9,04 | 1,19 | 0,23 |
| 18. Nganjuk | 474.429 | 113.630 | 10,70 | 1,48 | 0,31 |
| 19. Madiun | 405.127 | 74.070 | 10,79 | 1,67 | 0,37 |
| 20. Magetan | 396.696 | 62.650 | 9,84 | 1,55 | 0,34 |
| 21. Ngawi | 382.301 | 119.020 | 14,15 | 1,66 | 0,31 |
| 22. Bojonegoro | 403.403 | 153.400 | 12,21 | 1,90 | 0,40 |
| 23. Tuban | 421.287 | 178.050 | 15,02 | 2,89 | 0,81 |
| 24. Lamongan | 446.601 | 151.080 | 12,53 | 2,13 | 0,53 |
| 25. Gresik | 536.544 | 149.640 | 11,06 | 2,17 | 0,89 |
| 26. Bangkalan | 458.754 | 196.110 | 19,44 | 3,02 | 0,73 |
| 27. Sampang | 411.661 | 217.970 | 21,61 | 2,88 | 0,53 |
| 28. Pamekasan | 392.345 | 126.020 | 13,93 | 2,05 | 0,41 |
| 29. Sumenep | 427.882 | 206.200 | 18,76 | 3,72 | 1,16 |
| Kota: | | | | | |
| 71. Kediri | 537326 | 21.150 | 7,23 | 1,42 | 0,41 |
| 72. Blitar | 517363 | 10.650 | 7,37 | 0,90 | 0,19 |
| 73. Malang | 609.612 | 38.560 | 4,37 | 1,00 | 0,34 |
| 74. Probolinggo | 575.195 | 16.160 | 6,65 | 1,04 | 0,23 |
| 75. Pasuruan | 486.893 | 13.020 | 6,37 | 0,93 | 0,22 |
| 76. Mojokerto | 531.804 | 7.880 | 5,98 | 0,87 | 0,18 |
| 77. Madiun | 551.620 | 8.490 | 4,76 | 0,40 | 0,06 |
| 78. Surabaya | 652.540 | 138.210 | 4,72 | 0,69 | 0,18 |
| 79. Batu | 564.010 | 8.050 | 3,79 | 0,64 | 0,16 |
| Provinsi Jawa Timur | 460.909 | 4.181.290 | 10,38 | 1,62 | 0,38 |
| Indonesia | 505.469 | 26.161.160 | 9,54 | 1,59 | 0,40 |

Sumber: BPS

Lampiran 3: Galeri Foto Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.